



INTEGRASI PESANTREN DAN SEKOLAH:



Sistem dan Manajemen Pendidikan Terpadu pada Pendidikan Pesantren

Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag

Handwritten signature

INTEGRASI PESANTREN DAN SEKOLAH: Sistem dan Manajemen Pendidikan Terpadu pada Pendidikan Pesantren

Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag

ZENIUS
PUBLISHER

Penerbit : CV. Zenius Publisher

**INTEGRASI PESANTREN DAN SEKOLAH:
Sistem dan Manajemen Pendidikan Terpadu pada
Pendidikan Pesantren**

Penulis
Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag

Editor
Imam Sibaweh

Layout
Ahmad Zaeni

Juni 2022

Size: 182 x 257 mm, vii +160 pages.

ISBN : 978-623-5264-05-9

Published by: CV. Zenius Publisher

Anggota IKAPI Jabar

Jalan Waruoyom-Depok- Cirebon 45155,

Email : zenius955@gmail.com

Telp: (0231)8829291

Web. zeniuspublisher.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau lainnya, kecuali untuk dimasukkannya kutipan singkat dalam ulasan, tanpa terlebih dahulu izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah Swt, buku *Integrasi Sekolah dan Pesantren: Sistem dan Manajemen Terpadu pada Pendidikan Pesantren* bisa dirampungkan sesuai rencana. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan ummat, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir masa.

Tulisan dan kajian terhadap pesantren sudah banyak ditulis baik oleh sarjana Indonesia maupun para Indonesianis. Namun, kajian terhadap pesantren senantiasa menarik karena memiliki distingsinya tersendiri dibandingkan lembaga pendidikan Islam lainnya. Sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, pesantren senantiasa mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan sehingga tetap eksis bahkan semakin vital perannya dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

Pesantren memiliki peran yang vital dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren menjadi penjaga gawang dalam mempertahankan tradisi keagamaan ahlussunnah waljama'ah. Namun, pesantren juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan masyarakat dan zamannya. Integrasi pesantren dan sekolah merupakan salah satu produk dari dialektika pesantren dengan kemodernan. Pesantren tetap *survive* dan memiliki elan vital di tengah derasny arus perubahan dengan tetap mempertahankan ideologinya.

Tulisan ini menyajikan interaksi institusi pesantren, sebagai entitas asli pendidikan Islam nusantara, dan sekolah, yang merupakan institusi pendidikan bawaan penjajah Belanda. Pergumulan dan interaksi sistem pendidikan pesantren dan sistem sekolah melahirkan kesinambungan dan perubahan pada diri pesantren juga pada entitas sekolah. Semoga tulisan ini menambah bacaan tentang pesantren dari sudut pandang kependidikan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak. Saran dan kritik dari pembaca sangat dinantikan untuk perbaikan di masa mendatang. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Mas Imam Sibaweh yang telah mengedit naskah buku ini sehingga hadir menjadi buku di tangan para pembaca sekalian. Kepada Allah jugalah, penulis memohon ditunjukkan pada jalan yang lurus. *Wallahu a'lam bi al-shawaab.*

Cirebon, 05 Juni 2022
Penulis

DAFTAR ISI

Cover	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAGIAN PERTAMA	
<i>CRITICAL REVIEW SISDIKNAS</i>	1
A. Telaah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003	1
B. Lahirnya Undang-undang Pesantren	6
BAGIAN KEDUA	
<i>HISTORICAL PESANTREN</i>	21
A. Awal Mula Lahirnya Pesantren	21
B. Komponen Terbentuknya Pesantren	28
C. Tipologi Pesantren	33
D. Keunikan Pembelajaran Pesantren	36
BAGIAN KETIGA	
MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN	45
A. Konsep Manajemen Pendidikan	45
B. Manajemen Mutu Terpadu	50
C. Pengawasan Pendidikan Pesantren	56
BAGIAN KEEMPAT	
RASIONALISASI INTEGRAL PESANTREN DAN SEKOLAH	61
A. Pola Dasar Integralistik Pesantren dan Sekolah	61
B. Penelitian Berbasis Pesantren dan Sekolah	68
C. Literasi Integralistik Pesantren dan Sekolah	69
BAGIAN KELIMA	
DARI KLASIK MENUJU MODERNITAS PESANTREN	75
A. Pesantren Masa Lampau	75
B. Modernisasi Sistem Pendidikan Pesantren	80
BAGIAN KEENAM	
PERGULATAN MODERNITAS SEKOLAH DAN PESANTREN	87
A. Integrasi Kelembagaan	87
B. Aspek-aspek Integrasi Keilmuan	92

BAGIAN KETUJUH

KURIKULUM PESANTREN_____99

- A. Konsep Pengembangan Kurikulum_____99
- B. Kajian Kurikulum Pesantren_____110
- C. Metodologi Ilmu Islam dan Sekuler_____131

BAGIAN KEDELAPAN

SISTEM PESANTREN HUSNUL KHATIMAH___143

- A. Husnul Khotimah Kuningan Pesantren Modern _____143
- B. Sistem *Madrasî*: Model Pendidikan Integral _____149

DAFTAR PUSTAKA_____155

BIODATA PENULIS_____161

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1	Tabel 1.1 Jumlah Sekolah, Siswa, Kepala dan Tenaga Kependidikan SD	2
2	Tabel 1.2 Jumlah Pesantren se Jawa Barat 2020	19
3	Tabel 3.1 ruang lingkup manajemen pendidikan	46
4	Tabel 7.1 Paradigma Integralisme Islam	137
5	Tabel 7.2 Struktur Keilmuan Islam	140

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1	Gambar 3.1 Siklus PDCA	52
2	Gambar 3.2 Jumlah Pondok Pesantren Tahun 2020.	60
3	Gambar 7.1 Pertumbuhan Filsafat Menuju ke sekuler	131
4	Gambar 7.2 Pertumbuhan Ilmu Integralistik	132
5	Gambar 7.3 Internalisasi Nilai	133
6	Gambar 7.4 Model Monadik Totalistik	134
7	Gambar 7.5 Model diadik independen	134
8	Gambar 7.6 Model Diadik Komplementer	135
9	Gambar 7.7 Model Diadik Dialogis	135
10	Gambar 7.8 Model Triadik Komplementer	135
11	Gambar 7.9 Model Empat Kuadran Ken Wilber	136
12	Gambar 7.10 Struktur sains modern	138
13	Gambar 7.11 struktur ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam	139

BAGIAN PERTAMA

CRITICAL REVIEW SISDIKNAS



A. Telaah Undang-undang Sisdiknas

Bagian pertama buku ini, menyajikan sistem pendidikan nasional yang menjadi basis regulasi pendidikan di Indonesia, undang-undang nomor 20 tahun 2003. Undang-undang ini mengatur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan informal sebagai pendidikan keluarga. Bahkan, dalam pendidikan keluarga dikenal dengan pendidikan *parenting*. Pendidikan informal ini memberikan keleluasaan setiap keluarga untuk mendidik dan mengajarkan setiap anak-anak di dalam keluarga itu. Pendidikan nonformal yang dipraktekkan dalam dunia pesantren. Namun, seiring dengan perkembangan zaman pendidikan pesantren telah mengalami pergeserannya.

Bagian ini akan mengulas secara detail, pasal-pasal undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan akan direview dengan membangun nalar rasionalitas. dalam undang-undang itu memberikan pemahanan pendidikan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 10 yang menyatakan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Memberikan pemahaman bahwa satuan pendidikan menjadi kelompok layanan pendidikan bagi setiap manusia Indonesia. Pada jalur pendidikan formal sudah menjadi *mafhum* bahwa ini pendidikan berjenjang dari SD/MI sampai Pendidikan Tinggi dengan memperoleh lisensi ijazah formal. Pendidikan jalur formal ini merupakan kebutuhan pokok setiap warga bangsa, pendidikan yang menjadi pilihan perhatian utama dalam setiap kebijakan negara.

Pendidikan formal atau yang dikenal dengan sebutan sekolah merupakan focus utama. Hal ini, dapat dibuktikan dari mulai penerimaan siswa baru yang diatur sedemikian rupa, bahkan berdasarkan zona-zona wilayah, zona ini menentukan penerimaan wilayah sesuai dengan zona wilayahnya, artinya siswa yang bukan dari zona wilayah sekolah maka tidak diperkenankan untuk menjadi siswa yang diharapkan siswa tersebut. Memberikan zona suatu wilayah sekolah membatasi siswa untuk mengembangkan sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya.

Sekolah ini mengatur proses pembelajaran, proses pembelajaran yang diarahkan kepada kurikulum, silabus, KI-KD, sampai pembuatan RPP yang dipraktekkan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik yang sesuai dengan rencana pembelajaran dari guru-gurunya. Guru mengajar, dan bagaimana caranya mengajar diatur sedemikian rupa, bahkan guru dalam mengajar diatur sedemikian rupa harus memiliki empat kompetensi, yaitu: (1) pedagogis, (2) professional, (3) kepribadin, dan (4) social. Muncullah berbagai konsep dan teori yang berkembang untuk memberikan pendidikan guru atau lebih dikenal dengan nama *teaching and learning*.

Pendidikan formal dalam wadahnya yang disebut sekolah telah banyak memberikan andil dalam membentuk manusia yang handal dan kuat, namun disisi lain dipertanyakan konsep keberhasilan peserta didik, menentukan keberhasilan peserta didik masih sangat bias dan memudar. Keberhasilan peserta didik bukan ditentukan oleh lulus atau tidaknya siswa, tapi bagaimana menerapkan ilmu yang telah diperolehnya dalam bangku sekolah mampu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jumlah Sekolah dan siswa pada tahun 2019-2020 jalur formal dapat terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah, Siswa, Kepala dan Tenaga Kependidikan SD

No	Variabel	Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Sekolah	131.879	17.556	149.435
2	Siswa	21.624.026	3.579.345	25.203.371
	Laki-laki	11.265.465	1.883.802	13.149.267
	Perempuan	10.358.561	1.695.543	12.054.104

3	Mengulang	249.126	29.178	278.304
	Putus Sekolah	49.113	10.330	59.443
4.	Kepala Sekolah	436.672	120.297	556.969
	Laki-laki	131.404	32.275	163.679
	Perempuan	305.268	88.022	393.290
	Tenaga Kependidikan	76.690	14.433	91.123
	Laki-laki	42.974	5.662	48.636
	Perempuan	33.716	8.771	42.487

Sumber: statistik.data.kemdikbud.go.id

Tabel 1.1 memberikan pemahaman bahwa kekuatan sumber daya manusia menjadi dominan dalam pendidikan jalur formal di sekolah dasar se Indonesia. Dengan rincian sederhana tenaga kependidikan 91.123 orang, kepala sekolah 556.969 orang, 25.203.371 orang, dan 149.435 sekolah. Lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar ini 149.435 sebuah jumlah yang sangat besar, tentunya memerlukan daya tolong finansial yang tidak sedikit.

Pendidikan jalur pemerintah sangat terlibat besar, apalagi dengan ujian nasional yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan istilah yang digunakan dari tahun ke tahun mulai dari nama UASBN, UAN, UN, dan UNBK dengan sistem yang berbeda-beda, namun substansinya melakukan ujian sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ujian yang terakhir dengan ujian berbasis komputerisasi, namun dalam ujian ini banyak kendala dan persoalan terkait dengan jaringan internet.

Persoalan mutu pendidikan dalam pendidikan jalur, maka melalui undang-undang-undang nomor 20 tahun 2003, maka diaturlah pendidikan nonformal, pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan nonformal kata kuncinya adalah terstruktur dan berjenjang, pendidikan ini dapat dianalisa terdapat dalam pendidikan pesantren, sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan pesantren ada yang menggunakan local kurikulum, sebuah kurikulum yang mengacu pada gagasan Kyai, yang mengajarkan pendidikan agama melalui kitab kuning. Sementara ada pendidikan pesantren yang kurikulumnya berafiliasi

dengan pendidikan umum. Pendidikan pesantren yang afiliasinya dengan kurikulum nasional atau kurikulum pesantren dipadukan dengan kurikulum sekolah.

Pendidikan pesantren dalam perjalanannya menjadi sebuah karakter yang asli dari peradaban pendidikan bangsa Indonesia. Pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan agama yang mengalami pasang surut akibat diterpa berbagai isu-isu miring karena dianggap telah melahirkan manusia-manusia yang militan dan radikal. Pesantren tumbuh sebagai kekuatan basis keagamaan yang kokoh dan menjadi kekuatan yang dikhawatirkan dalam perjalanannya.

Pesantren hadir memberikan warna peradaban bangsa ini, pesantren telah mencurahkan pandangan politiknya sebagai kekuatan yang moderat dan radikal, hampir semua pemimpin local maupun nasional terpengaruh oleh gagasan dan merujuk kepada Kyai yang menjadi sentral pemikiran warga bangsa. Bahkan, persoalan kebangsaan ini banyak yang terpengaruh oleh pemikiran yang moderat. Sebuah pemikiran tokoh-tokoh agama yang lebih toleransi terhadap setiap perbedaan, karena perbedaan itu adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi.

Pendidikan nonformal dalam bentuk pesantren melahirkan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren pasal 1 ayat menyatakan bahwa pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan *muallimin*.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat dalam pasal 30 ayat 4 berada dalam kategori pendidikan keagamaan yang menyatakan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan keagamaan ini pengelolaannya bisa diselenggarakan pada pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pendidikan pesantren sebagai sebuah pendidikan yang khas dari kekayaan bangsa belum dilaksanakan secara maksimal, terbukti belum adanya pelaksanaan undang-undang pesantren yang lahir tahun 2019 nomor 18. Regulasi ini lahir karena tuntutan kebutuhan dan pengakuan dari pemerintah. Meskipun pendidikan pesantren lahir sebelum bangsa ini lahir.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan ini memberikan nilai dan respon nilai dalam kehidupan bernegara. Pendidikan informal menjadi pendamping pendidikan formal dan informal, artinya ukuran keberhasilan yang diterima dari peserta didik dalam proses input pendidikan di bangku sekolah dan bangku pesantren menempatkan masyarakat sebagai *evaluator* alam yang paling terdepan. Masyarakat menjadi pengawas yang dominan dalam kehidupannya, peserta didik yang telah memperoleh ilmu pengetahuan akan dievaluasi melalui nilai-nilai kearifan local masyarakatnya.

Pendidikan formal, nonformal maupun informal sebenarnya saling melengkapi dan memperkaya peserta didik, nilai kehidupan masyarakat yang tidak didapatkan dalam bangku pendidikan sekolah sebagai pendidikan formal dan pendidikan pesantren sebagai pendidikan informal dilengkapi oleh pendidikan masyarakat sebagai pendidikan informal. Namun, pendidikan informal ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Bahkan, melalui proses ujian kelulusan peserta didik, pengakuan hasil ujian pendidikan ini diatur oleh peraturan pemerintah.

Pendidikan informal menempatkan sekolah rumah sebagai basis pendidikannya, namun akan memperoleh ujian yang bisa dinyatakan lulus setelah menempuh ujian kesetaraan. Ujian kesetaraan itu menyangkut ujian paket A, B, dan C. Pendidikan sekolah rumah masih belum diberdayakan secara nasional terbukti ujian sekolah rumah masih menumpang dalam kelulusan ujiannya pada ujian kesetaraan.

Pendidikan sekolah rumah masih belum dianggap serius, meskipun secara undang-undang narasinya sangat jelas, namun dalam praktek-prakteknya belum menjadi kunci yang mengantarkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan, artinya masih belum bisa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih atasnya lagi. Hal inilah, yang sangat penting dalam pendidikan keluarga.

Pendidikan sekolah formal, atau pendidikan sekolah nonformal berangkat dari pendidikan sekolah rumah atau pendidikan keluarga. Pendidikan itu harus bersumber dari pendidikan sekolah rumah, setiap keluarga memiliki harapan dan cita-cita yang besar terhadap putra-putrinya untuk melanjutkan cita-cita keluarga. Bukan, sesuai dengan keinginan pihak tertentu.

Keluarga garda terdepan dalam membangun nilai, keluarga-keluarga sebagai kumpulan besar yang mengharapkan cita-cita bersama dalam wujud keluarga bangsa. Nilai-nilai bangsa terbangun dari nilai-nilai keluarga bangsa itu. Pendidikan yang bersumber dari budaya, adat-istiadat, tradisi dan etnis masing-masing dari bangsa Indonesia, pendidikan yang berangkat dari kearifan local bangsanya.

Pendidikan formal, nonformal dan informal tidak berdiri sendiri. Tetapi pendidikan yang bersifat integralistic yang satu sama lainnya saling mendukung dan melengkapi. Pendidikan formal memerlukan pendidikan nilai melalui pendidikan nonformal, pendidikan nonformal memberikan pengetahuan yang tidak diperoleh dalam pendidikan formal. Pendidikan formal memerlukan pendidikan informal, banteng moral dari pendidikan formal berada di dalam keluarga menjadi pengawasan pendidikan di dalam lingkungan keluarga, pendidikan informal memberikan pengetahuan yang kokoh dalam berbagai dimensi pendidikan itu. Celah inilah yang melandasi satuan lembaga pesantren, tidak secara spesifik tapi majlis adalah satuan lembaga pendidikan yang basisnya adalah Islam.

Satuan pendidikan yang sejenis inilah yang dipahami sebagai kekuatan pendidikan pesantren sebagai satuan lembaga pesantren menjadi lembaga independen semenjak masa lampu namun belum terakomodir oleh pemerintah, namun jika melihat pada pasal 30 maka ini disebut sebagai lembaga keagamaan itu seperti pesantren yang bisa dilaksanakan secara formal, nonformal dan informal. Narasi yang belum dipahami secara psikologis maupun sosiologis, namun arahnya sudah nampak dengan adanya undan-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

B. Lahirnya Undang-undang Pesantren

Pendidikan pesantren melakukan pendidikannya secara mandiri, dengan kajian kitab kuning, kitab kuning dipahami sebagai rujukan utama dalam pembelajaran pesantren yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa lainnya yang dipelajari dalam lingkungan pesantren. Pendidikan pesantren harus berasaskan ketuhanan YME, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multicultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, kepastian hukum. Undang-undang pesantren mempertegas bahwa pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan pesantren sebagai sebuah lembaga independen yang mengelola pendidikannya secara mandiri, menjadi banteng moral yang tiada tandingannya, menjadi pelopor moral yang menggerakkan semua segmen kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan pesantren bersumber pada spirit keikhlasan bagi pendirinya dan memberikan keteladanan bagi para santrinya dalam menapaki jejak sang guru.

Dunia pendidikan sering sekali menghadapi fenomena kenakalan anak didiknya, terutama pada pendidikan formal, kenakalan remaja yang kebanyakan anak-anak sekolah telah menodai keberhasilan pendidikan formal, sebagai lembaga yang mendidik generasi, seperti perkelahian antar pelajar, pesta miras, pesta seks, ikut terlibat dalam *genk* motor, melakukan perbuatan tak senonoh, melawan guru dan melakukan perbuatan yang meresah. Permasalahan ini telah mencederai dunia pendidikan, karena kebanyakan pelakunya anak-anak sekolah. Pendidikan yang seharusnya memberikan menjadi tolok ukur nilai-nilai kehidupan yang membangun karakter kebangsaan, namun tidak bisa memberikan pendidikannya kepada anak-anak tersebut.

Lalu apakah semua kenakalan itu tertumpu kepada sekolah? Tentunya tidak, karena sekolah hanyalah sebagai jembatan untuk mengantarkan anak didiknya memiliki pengetahuan, dengan pengetahuan anak didik mampu membentengi dirinya dengan moral dan etika, apakah pendidikan moral dan etika disampaikan dalam sekolah? Pastinya, pendidikan moral dan etika disampaikan di sekolah, berapa jam anak didik memperoleh pendidikan moral dan etika di sekolah? Inilah permasalahannya. Misalnya dua jam dalam satu minggu.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apa yang bisa dilakukan dalam dua jam satu minggu itu, penulis berasumsi bahwa dua jam satu itu hanyalah materi, tanpa memperhatikan betul bagaimana sikap dan sifat anak didik untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikalkulasikan dua jam satu minggu dikali empat minggu, berarti delapan jam dalam satu bulan, jika dihitung dalam satu tahun maka delapan jam dikalikan 12 bulan, maka 96 jam dalam satu tahun, dikalikan anak sekolah dari mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas sejumlah 96 dikali 12 tahun 1152 jam, angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah waktu jam yang masih tersisa 22 jam dalam sehari.

Kita kalkulasikan 22 jam dalam sehari dikalikan dengan satu tahun 365 hari, maka jumlahnya 8.008 jam, jika dikalikan dengan jumlah belajar anak didik dari mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, maka akan

diperoleh angka 96.096 jam waktu yang masih kosong untuk digunakan, berarti jika dibandingkan dengan pendidikan moral dan etika di sekolah, maka hanya 1.20 persen materi yang disampaikan dalam hidup mereka mendapatkan pengetahuan pendidikan moral dan etika, masih ada sis 98.80 persen yang masih belum digunakan secara maksimal, penghitungan ini masih menggunakan penghitungan normal jam belum menggunakan jam pelajaran yang setiap jenjang berbeda-beda, dan penghitungan jam pelajaran lebih kecil dari jam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kelemahan pendidikan formal dalam menerapkan pendidikan etika dan moral dengan membuat regulasi yang lebih elegan bahwa pendidikan formal merupakan satu kesatuan yang integral dengan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pendidikan masyarakat dan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh keluarga. Pendidikan keluarga sebagai pendidikan informal berada di luar rumah, begitu juga pendidikan nonformal berada di luar rumah, ketiga pendidikan tersebut saling melengkapi. Hal ini, sesuai dengan penjelasan UURI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa strategi yang telah dibuat diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Strategi itu adalah: (1) melaksanakan pendidikan agama serta akhlak mulia, (2) mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi, (3) berproses mendidik dan dialogis, (4) melakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan, (5) meningkatkan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, (6) menyediakan sarana belajar yang mendidik, (7) Membiayai pendidikan berprinsip pemerataan dan keadilan, (8) Menyelenggarakan pembelajaran yang terbuka dan merata, (9) Melaksanakan wajib belajar, (10) melaksanakan desentralisasi manajemen pendidikan, (11) memberdayakan fungsi dan peranan masyarakat, (12) membangun pusat pendidikan dan budaya masyarakat, dan (13) melaksanakan pengawasan pendidikan.

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, pada poin pertama menyangkut pendidikan pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, inilah kata kunci yang sangat ideal dalam menerapkan pendidikan akhlak mulia, sebuah nilai agama yang mengedepankan prinsip akhlak mulia. Pendidikan akhlak mulia, hanya bisa didapatkan melalui pendidikan agama, sementara pendidikan agama sangat sedikit sekali untuk

diberikan kepada peserta didik, lalu apakah akan mengabaikan pendidikan pada pembelajaran yang lainnya, jika hanya pendidikan akhlak mulia saja, maka inilah yang menjadikan kita untuk membangun keseimbangan pola pendidikan agama dengan pendidikan materi pelajaran yang lainnya.

Keseimbangan pendidikan antara pendidikan agama dan pendidikan formal, memberikan keleluasaan dan pemikiran untuk mengintegrasikan pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan informal. Pengintegrasian ini menjadi penting karena pergeseran nilai dan moral mulai dirasakan dalam jagat ini, pendidikan hadir dalam menyikapi fenomena social yang sangat mengkhawatirkan, maka bangunan utama yang penting untuk memberikan pengetahuan pendidikan keluarga. Namun, pendidikan keluarga tidak banyak yang menanggapi secara serius, karena penting bagi peletak dasar pendidikan anak ketika berada di luar rumah.

Namun, bagaimana penerapan kurikulum dalam membangun pendidikan yang berimbang antara pendidikan agama dengan pendidikan sekolah, kurikulum itu tidak mungkin berubah, namun akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman, seperti halnya perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis kompetensi ke kurikulum tingkat satuan pendidikan, dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ke kurikulum tahun 2013, namun akan terus mengalami perkembangannya sesuai dengan kebutuhannya itu.

Kondisi saat ini, pendidikan sekolah dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam memberikan pendidikan bagi generasi, pendidikan sekolah dianggap sebagai pendidikan yang mampu bersaing dalam percaturan global, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan sekolah yang memiliki anak-anak nakal, namun disisi lain ada anak-anak yang berprestasi dalam kancah nasional maupun internasional. Pendidikan yang telah menorehkan prestasi pendidikan bagi anak-anak generasi. Namun, terus akan mengalami pergeseran dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, perkembangan teknologi telah memanjakan anak-anak dalam bermain *game* yang terdapat dalam android dan berbagai alat-alat teknologi, membuat anak-anak kita lalai dalam belajar dan menimba pengetahuan.

Dunia pendidikan pun ikut andil dalam menciptakan permainan-permainan *game* yang terdapat dalam aplikasi android dan alat-alat teknologi tersebut, namun bagaimana menciptakan rasa senang dengan *game* agama yang telah merenggut minat dan motivasi belajar anak-anak tersebut, inilah yang terus menerus akan menjadi perhatian dan tajuk utama dalam membuat langkah

strategis pendidikan dalam menghalau perubahan zaman, namun tidak menghilangkan dan lari dari perubahan zaman tersebut. Pendidikan ikut mewarnai nilai-nilai pendidikannya dalam internetisasi pendidikan. Kekhawatiran semakin memuncak ketika muncul berbagai *game-game* yang tidak senonoh yang telah membuat pikiran anak-anak kita teracuni oleh berbagai fitur-fitur yang telah membuat anak-anak kita menerima nilai-nilai kebaikan, muncul berita berbagai dampak negative dari *game-game* tersebut.

Data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2017– 2019 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Indikator peningkatan kejahatan pada masa tahun 2017-2019 berada ditingkat rendah. Tingkat kejahatan tahun 2017 adalah sebesar 129, pada tahun 2018 menurun 113, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 103 (BPS, 2020:6).

Kabar ini sangat menggemburkan karena tingkat kejahatan mengalami penurunan, namun disisi lainnya akan menjadi pertanyaan bagaimana tingkat kejahatan mengalami penurunan, apa penyebab penurunan ini? Karena kejahatan itu bisa muncul secara verbal atau secara nonverbal, kejahatan yang bersifat atau yang bersifat psikis, inilah yang masih belum dikaji secara mendalam. Persoalannya bisa saja, polisi tidak melaporkan peristiwa kejahatannya, atau tidak ada yang tertangkap oleh polisi atau kejahatan yang masih dianggap ringan, sehingga tidak ada pelaporan. Tetapi inilah, inilah keberhasilan pihak kepolisian yang telah menurunkan angka kejahatan.

Data Susenas ini sama dengan data kepolisian tahun 2018-2019 dengan pola yang cenderung menurun. Persentase kejahatan mengalami penurunan dari 1,11 ke 1,01 pada tahun yang sama. Informasi Susenas juga menunjukkan tingkat persentase korban kejahatan yang melapor ke Polisi masih relatif rendah. Pada tahun 2018 korban kejahatan yang melapor ke Polisi sebesar 23,92 persen, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 22,19 persen (BPS, 2020:6).

Pola yang dilakukan Susenas juga mengalami penurunan, sehingga angka ini cukup menggemburkan, namun angka ini memerlukan kerja keras agar sampai lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Jika angka ini diurai dengan berbasis seluruh penduduk Indonesia, misalnya angka 22,19 persen tahun 2019 berarti diangka 59.957.380 dari 270.2 juta penduduk Indonesia. Angka yang

sangat besar, jika menyebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi maka berada di angka 1.763.450 orang jika dibuat rata-rata dari analisa sederhana, maka jika dibagi dengan 514 kabupaten/kota di Indonesia, maka berarti di angka 116.649 pelaku kejahatan, jika dibagi seluruh desa dan kelurahan 83.931 berarti di angka 714.35 setiap desa.

Pertanyaannya adakah satu desa tanpa kejahatan? Adakah satu desa yang bisa dijadikan contoh tanpa kejahatan, inilah sebuah angka yang memiliki nilai matematis yang real, tetapi mengabaikan penyebab kejahatan itu muncul, dan bagaimana menghentikan kejahatan itu agar tidak terjadi. Namun, usaha untuk membangun kesadaran moral sangatlah penting. Persoalan inilah yang menjadi kekhawatiran semua pihak. Maka mulai banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan pesantren, sebuah solusi dan jawaban dari persoalan kenakalan remaja, yang kemudian banyak pesantren yang mengadopsi sistem pembelajaran modern sistem pendidikan yang memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum, karena pendidikan agama dipercaya memberikan pengetahuan moral yang lebih utuh, sementara pendidikan umum membangun pengetahuan yang berbasis pada intelektualitas.

Improvement sistem pendidikan nasional perbedaan pendidikan pemerintah dan masyarakat serta pendidikan keagamaan dan umum, hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan berhak dikelola masyarakat sesuai dengan ciri khas, agama dan budaya masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat tidak serta merta sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengabaikan regulasi pemerintah, kepentingan pemerintah dan masyarakat harus sejalan dan seiring tidak bisa sesuai dengan keinginannya sendiri, harus menghargai setiap tujuan dan cita-cita pemerintah, tujuan luhur menyelenggarakan pendidikan oleh masyarakat harus sesuai dengan tujuan luhur pemerintah. Sebagaimana pasal 55 ayat (2) bahwa penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Standar nasional pendidikan, meliputi: (1) standar pengelolaan Permendikbud nomor 19 tahun 2007, (2) standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, (3) standar isi Permendikbud Nomor 21 tahun 2016, (4) standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016, (5) standar penilaian Permendikbud nomor 23 tahun 2016, (6) standar pendidik dan tenaga

kependidikan Permendikbud nomor 12, 13, 16 tahun 2007, Permendikbud nomor 24, 25, 27 tahun 2008, Permendikbud nomor 40, 41, 42, 43, 44 tahun 2009, (7) standar sarana prasarana Permendikbud nomor 24 tahun 2007, Permendikbud nomor 33, 40 tahun 2008, dan (8) standar biaya Permendikbud nomor 69 tahun 2009.

Pendidikan yang diatur dalam standar nasional ini lebih kepada pengaturan pendidikan formal, namun belum menyentuh pendidikan nonformal atau pendidikan informal, pendidikan nonformal dalam perkembangannya mendapatkan tempat untuk diakreditasi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan yang berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan dari satuan pendidikan yang terakreditasi yang pengawasannya oleh penilik yang dievaluasi. Standar nasional pendidikan karakteristiknya diatur oleh satuan pendidikannya yang disesuaikan kebutuhan masyarakat secara terstruktur.

Sementara nasional pendidikan pada pendidikan informal diatur oleh keluarga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan tidak terstruktur, peserta didiknya bisa mengikuti ujian pada satuan pendidikan yang terakreditasi yang diatur oleh badan standar nasional pendidikan (BSNP).

Pendidikan kita sudah mengatur pada pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan akhlak mulia, namun memerlukan daya dorong dalam membangkitkan motivasi dan minat belajar, sudah menjadi maklum bahwa satu-satu benteng moral bangsa ini adalah pendidikan pesantren, karena meneladani sikap-sikap Kyainya sebagai panutan warga santri. Kyai menjadi figure yang memberikan tata nilai dan tata hidup bagi santrinya, menjadi tolok ukur standar perilaku dan pergaulan.

Kegembiraan kalangan pesantren begitu meluap, ketika muncul undang-undang nomor 18 tahun 2019, yang kurikulumnya dikembangkan sesuai dengan kekhasan pesantren dengan tidak mengabaikan kurikulum pendidikan umum dengan tidak meninggalkan basis kitab kuningnya, sementara pada pesantren ma'had aly wajib memberikan muatan materi Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

Undang-undang nomor 18 tahun 2019, merupakan penguatan legal formal pesantren yang selama ini dianggap sebagai anak tiri, pesantren sebagai pendidikan yang ikut memberikan andil besar dalam mencetak kader-kader

bangsa. Pesantren yang dianggap sebagai pendidikan kumuh dan kotor, telah mewarnai pendidikan negeri ini selama berabad-abad lamanya. Namun, pengakuan negara masih setengah hati, hadirnya undang-undang ini telah memberikan kemantapan dan pengakuan dari negara yang kokoh mempertegas eksistensi pesantren di tengah-tengah percaturan global.

Pengaruh pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat terasa dengan nilai-nilai kebaikannya, hal ini terbukti bahwa pesantren memberikan nilai-nilai penghargaan terhadap kelompok-kelompok keagamaan ketika Pancasila dalam sila pertama semula berbunyi, *ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya*. rumusan yang dikenal dengan nama piagam Jakarta. Namun, tujuh kata telah membuat pro kontra bagi perumusan dasar negara, dan dianggap telah menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

Perjalanan rumusan dasar negara menjadi tegang karena persoalan ini dianggap sangat sensitif, namun atas kesediaan tokoh-tokoh Islam yang moderat lebih mempertimbangkan keutuhan negara daripada menimbulkan perpecahan maka tujuh kata dihilangkan, rumusannya menjadi *ketuhanan Yang Maha Esa*. Hadiah terbesar dari kalangan pesantren yang sangat mencintai negerinya. Pendidikan nilai penghargaan terhadap kelompok keagamaan yang berbeda pandangan, seharusnya menjadi teladan semua pihak, bahwa kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama.

Pentingnya pendidikan memberikan kesadaran bagi setiap orang untuk menghargai setiap individu, pendidikan telah mengantarkan pada kesempurnaan hidup, karena menyadari bahwa dirinya tidak sendiri. Pendidikan memberikan pengetahuan yang berharga dalam cinta kasih dan cinta damai, itulah sebuah harapan pengetahuan itu diperoleh. Namun, kenyataannya bertolak belakang dengan harapan-harapan itu. Pengetahuan yang diperolehnya untuk menipu orang, tidak menghargai setiap orang yang berbeda.

Indonesia sebagai bangsa yang besar, memiliki berbagai aneka budaya dan tradisi, memiliki kekayaan yang tak ternilai membentuk sebuah peradaban yang bernama Indonesia, dan setiap warganya memerlukan kesadaran untuk menghargai perbedaan yang ada, bukan mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana Parekh (2012:109) menyatakan bahwa kehidupan moral tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan yang lebih luas dan dijunjung tinggi sebagai bidang pengetahuan *transcendental*, kebudayaan mewakili sebuah jalan hidup yang

berbeda, kebudayaan harus didekati dengan sensitivitas dan empati tinggi serta memerlukan daya imajinasi yang kuat.

Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa (etnis), jumlah suku yang dengan angka besar, namun memiliki persamaan dalam satu bangsa yang bernama Indonesia. Perbedaan suku bangsa sangat mudah untuk bertikai satu sama lainnya, namun yang unik perbedaan itu dapat disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Inilah kekayaan yang paling nyata, dalam keberagaman yang berbeda.

Kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dengan baik, undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar NRI tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Penghargaan terhadap agama dan kebudayaan tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, ini merupakan bentuk penghargaan bahwa agama dan budaya menjadi akar pendidikan nasional. Semua aspek pendidikan nasional harus melihat bagaimana agama dan budaya menjadi daya topang dan menjadi kekuatan yang harus dipertahankan. Agama dan budaya menjadi erat dan rekat yang membentuk pendidikan nasional.

Agama tidak bisa berdiri sendiri tanpa budaya, begitu juga budaya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya agama. Ibaratnya ruh dan jasad, ruhnya adalah agaman sementara budaya adalah jasadnya. Agama tanpa budaya maka akan tidak akan terlihat, begitu juga budaya tanpa agama maka mati. Sama halnya, ruh tanpa badan maka dia tidak akan bisa menggerakkan sesuatu yang nampak, badan tanpa ruh dia akan berjalan seperti orang mati.

Muncul berbagai konsep keagamaan ada yang mengkaitkan agama dengan psikologi, psikologi telah melakukan banyak hal yang terkait dengan fakta-fakta empiris, dan banyak dari fakta-fakta tersebut tidak mudah diakses oleh pengalaman biasa yang kemudian berhadapan dengan persoalan religi, yang menganggap bahwa fungsi religius otentik bersemayan di pikiran bawah sadar (Jung, 2017: 9).

Pendidikan telah memberikan pengalaman yang berharga, bahwa semua manusia mampu berpikir untuk membuat budaya dan psikologi disesuaikan

dengan agama, bukan menjadikan budaya mempengaruhi agama, atau psikologi mempengaruhi agama. Pemahaman pendidikan yang sangat luas dan kompleks, membuat kebijakan yang mengarah pada pembangunan budaya sebagai karakter yang tidak terlepas dengan agama.

Kebijakan pendidikan yang dimaksud, memberikan jalan bagi pelaku-pelaku pendidikan untuk diterapkan dalam kehidupan pendidikan. Kebijakan secara sederhana berarti *policy*, sementara kebijaksanaan berarti *wisdom*, namun dua kata ini sepertinya sama tapi berbeda, kebijaksanaan menyangkut konteks sementara kebijakan menyangkut tek-tek regulasi, kemudian muncul kebijakan public, kebijakan pendidikan, dan kebijakan negara.

Irianto (2011:34) menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi program pemerintah yang menjadi kehendak atau bukan, untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan berarti apa-apa yang hendak menjadi keinginan pemerintah artinya kebijakan itu menyangkut regulasi yang akan diberikan kepada seluruh komponen bangsa, dan kebijakan ini harus diikuti oleh semua komponen bangsa, karena mengandung kebaikan dan nilai-nilai kesepakatan. Sementara kebijaksanaan *wisdom* merupakan hak-hak pemerintah untuk memberikan toleransi dengan batas-batas *policy* atau kebijakan.

Irianto (2011:49) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan dalam konteks kebijakan pendidikan, antara lain:

1. Kebijakan pendidikan diperoleh berdasarkan temuan lapangan dengan basis ilmiah.
2. Jalur, jenis dan jenjang menggunakan alat ukur analisis dengan kriteria, alat dan prosedur secara relative.
3. Hasil dan dampak nilai pendidikan dari suatu implementasi kebijakan harus bersifat instrinsik maupun ekstrinsik.
4. Proses aktif menjadi nilai positif pada setiap implementasi kebijakan
5. Harus yakin bahwa apa yang diusahakan baik dan buruknya suatu implementasi kebijakan bergantung pada usahanya.

Kebijakan pendidikan berbasis penemuan empiris, memberikan jalan keluar bagi pelaku pendidikan untuk berbuat sesuai dengan regulasi pemerintah,

karena setiap kebijakan itu akan selalu keadaan real yang sesuai dengan fakta-fakta di lapangan pendidikan. Namun relativitas dalam setiap kebijakan tergantung situasi dan kondisi, kebijakan itu harus dilaksanakan agar menghasilkan nilai-nilai kebaikan, nilai kebaikan itu tergantung bagaimana berproses yang akan menghasilkan nilai-nilai yang baik.

Arwildayanto (2018:58) menyatakan bahwa menyusun masalah kebijakan terdiri dari tiga langkah, yaitu: (1) mengartikan, (2) mengkonsep, dan (3) mengkhususkan masalah. Keadaan dan bentuk masalah bergantung pada tiga aspek tersebut. Tiap langkah-langkah itu agar selalu sinkron dengan filosofisnya.

Pendidikan dihadirkan tidak tanpa penelitian terlebih, melalui berbagai analisis dengan berbagai pendekatannya, ada yang bersifat *top-down*, *bottom-up*, *empirical*, dengan model-modelnya seperti model deskriptif, model normative, model verbal diekspresikan (Arwildayanto, 2018:59). Irianto (2011:51) menyatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif yang mencakup rumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan.

Kebijakan pendidikan pesantren memberikan ruang gerak yang luas, dalam mengembangkan pengelolaan pesantren, dengan mengokohkan kurikulumnya, sarana dan prasarananya, Kyai dan ustad-ustadnya, santrinya, serta membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar pesantren. Kohesifitasnya sangat kuat karena hampir seluruh pesantren memiliki ideology yang sama, metode pengajaran dan pemahaman yang sama, menggunakan kitab yang sama, bahkan menggunakan kitab yang dianggap *mu'tabar* saja (Alzastrow, 2006:3).

Kebijakan pesantren lebih cenderung kepada kebijakan local, pesantren memberdayakan potensi lokalnya dengan maksimal, dengan merujuk kekhasan yang hampir sama, namun memiliki cara pengembangan berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Bahkan, pesantren hanya melibatkan keluarganya saja, kekuatan keluarga tidak menjadi persoalan karena yang terpenting adalah pesantren sangat kental dengan nilai-nilai agama dan moral. Pendidikannya 24 jam, setiap aktivitasnya mengandung nilai.

Posisi penting kyai, ajengan, tengku, tuan guru, atau tokoh agama lainnya di tengah masyarakatnya dalam penyebaran agama Islam. Bahkan, bukan hanya dipandang sebagai penasehat spriritual, tetapi juga dianggap sebagai tokoh

kharismatik bagi para santrinya yang dianggap memiliki kekuatan batin dan kemampuan menjelajah alam supranatural (Hanif, 2006:30).

Kepemimpinan kharismatik, sering disebut sebagai *charismatic authority* mampu memberikan otoritasnya secara kharismatik, setiap individu memberikan penghargaan yang tinggi kepada kyai karena memiliki kharismanya, bahkan dianggap orang yang memiliki aura positif dalam memberikan ketenangan kepada setiap individu. Nilai pribadi sang kyai telah menjadi rujukan masyarakat, baik secara ekonomi dan politik. Kyai dianggap memberikan pandangan dan pemikiran yang lurus dan benar. Kyai sebagai penerus perjuangan para nabi, memiliki kekuatan mendapatkan *ilham* dari Tuhan, yang kebanyakan orang menganggapnya sebagai guru spiritualnya.

Kyai menjadi rujukan setiap individu, memberikan akses bagi para politik untuk mendekati kyai, kyai memiliki masa yang banyak untuk mempengaruhi setiap jamaahnya dalam kegiatan perpolitikan. Kyai tidak bias melepaskan diri dari hiruk pikuk politik, karena setiap ruang geraknya selalu menjadi bahan diskusi setiap orang. Relasi antara kyai dan politik selalu menjadi hal yang menarik, keterlibatannya harus dilihat dari perspektif Islam dengan politik yang tidak bisa dipisahkan (Suprayogi, 2017:1).

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa kyai, tuan guru, Anre Gurutta, Insiyak, syekh, ajengan, buya, nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.

Pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2019 bahwa pesantren terdiri atas:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin*;
3. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Penjelasan pasal 5 ayat 1 bahwa pesantren *salafiah*, penyelenggara kitab kuning, ayat 2 bahwa pesantren modern atau pesantren *muallimin*, penyelenggara

pendidikan *dirasab Islamiyah*, ayat 3 pesantren terpadu, penyelenggara kitab kuning dan pendidikan umum.

Pendidikan pesantren masa kini dengan masa lampau, jelas berbeda dalam mengembangkan visi, misi dan tujuannya, yang paling jelas kehadiran pesantren masa lampau sebagai perintis suatu desa, namun pesantren abad 20 kehadirannya di tengah-tengah desa yang sudah ramai, pesantren masa kini dengan masa lampau memiliki cita-cita yang sama yaitu mentransmisikan ajaran Islam (Shodiq, 2011:111).

Poinnya adalah mentransmisikan ajaran Islam, keberadaan pesantren diterima masyarakat karena persoalan ketauhidan yang selalu dikedepankan, pesantren menjadi penerang dan jalan keluar bagi persoalan tauhid, keesaan tuhan yang membuat masyarakat menerima, bahkan tidak mungkin untuk tidak diterima karena pengetahuan agama diasuh oleh kyai yang memiliki pengetahuan bidang keagamaan yang mumpuni.

Masyarakat akan memberikan apresiasinya kepada kyai dan juga para santri yang telah belajar agama kepada guru-guru yang bukan hanya memberikan pengetahuan kepada santrinya, tetapi memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar dengan mengadakan kegiatan majlis taklim, dan pengajian rutin setiap satu minggu sekali, sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat sekitar.

Jumlah pondok pesantren di Indonesia hingga kini berkisar pada angka 14.361 buah yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara dengan tipologi yang amat beragam (Haedari, 2005 :219). Sementara jumlah pondok pesantren di Jawa Barat terlihat pada tabel 2 daftar pesantren, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pesantren se Jawa Barat 2020

Nama kabupaten	Total Pesantren	Total Mukim
Bogor	1060	27223
Sukabumi	629	19524
Cianjur	246	10298
Bandung	127	8955
Garut	1030	24920
Tasikmalaya	1318	33239
Ciamis	439	12451
Kuningan	19	1339
Cirebon	725	15153
Majalengka	253	17444
Sumedang	245	14540
Indramayu	66	14916
Subang	31	3388
Purwakarta	184	10602
Karawang	462	13559
Bekasi	200	12405
Bandung Barat	471	4332
Pangandaran	138	6484
Kota Bogor	144	5763
Kota Sukabumi	93	2781
Kota Bandung	90	6473
Kota Cirebon	41	2848
Kota Bekasi	7	830
Kota Depok	49	8753
Kota Cimahi	30	2278
Kota Tasikmalaya	206	12501
Kota Banjar	40	4886

Sumber : Kemenag RI

BAGIAN KEDUA

HISTORICAL PESANTREN



A. Awal Mula Lahirnya Pesantren di Nusantara

Dilihat dari konteks historis, keberadaan pesantren di Indonesia dari semenjak kemunculannya hingga masa yang paling belakangan, agaknya menunjukkan gejala metamorfosis dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dari pola tradisional menuju kemodernan. Pesantren lahir di Nusantara yang pada awalnya lebih berfungsi sebagai institusi yang mentransmisikan ajaran-ajaran Islam serta reproduksi ulama, kemudian melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam segi bentuk dan isinya, sebagai akibat dari perbenturan budaya dengan dunia luar. Pesantren dalam konteks ini dihadapkan pada pilihan antara melakukan kontinuitas dan memperbaharui fungsi dan perannya sebagai institusi pendidikan di satu sisi, dan sebagai sub kultur di sisi yang lain.

Dalam merekonstruksi sejarah pesantren di Indonesia, bagian ini dimulai dengan paparan tentang kelahiran pesantren. Lembaga pendidikan tradisional penting dikaji sejarah kemunculan dan perkembangannya untuk mengetahui karakteristik awal pendidikan pesantren. Oleh karena itu, model pendidikan yang ditawarkannya mendapat perhatian untuk pembahasan berikutnya. Selanjutnya, akan dibahas tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang kemudian mempengaruhi pada kemuculan pembaharuan pendidikan Islam, tak terkecuali pesantren di dalamnya. Dari pembahasan bagian ini akan diperoleh tidak hanya gambaran mengenai asal-usul pesantren, tetapi juga dinamika pesantren dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling awal di Indonesia. Dari sisi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*), Pesantren dipandang sebagai lembaga yang sangat asli karena mengandung sejarah panjang di Indonesia (Arifin, 2012: 40). Pada lembaga ini berpadu corak keindonesiaan dan keislaman sekaligus. Pesantren dengan berbagai sebutannya di

Indonesia misalnya di Sumatera Barat, disebut *surau* sementara di Aceh disebut *dayah* atau *meumasab* (Azra, 2003:7, Asabri, 2007:280).

Meski penamaan pesantren berawal dari Jawa, akan tetapi penamaan tersebut sudah menjadi *lumrah*. Pesantren juga ditemukan di Asia Tenggara lain, seperti di Thailand dan Malaysia sebagai contoh lembaga pendidikan ini disebut pondok, berasal dari bahasa Arab *funduq* yang tempat tidur atau ruang istirahat (Manfred, 1986:69).

Secara etimologis, istilah pesantren merupakan kata jadian dari kata santri yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*. Santri berasal dari kata, yaitu: *pertama*, santri berasal dari kata *shastri*, bahasa Sangsakarta yang berarti orang yang ahli tentang kitab suci agama Hindu atau berarti orang yang mengenal baca tulis, *kedua*, berasal dari kata *cantrik*, yang sangat setia kepada gurunya dimana dan berada guru itu berada dan menetap, *ketiga*, berasal dari bahasa Tamil, guru yang memberikan pengajaran agama (Dhofier, 1994:18). Meski memiliki asal-usul dan makna yang berbeda tapi istilah santri itu sendiri sebenarnya menunjuk pada pengertian orang yang dalam hidupnya senantiasa haus akan ilmu, oleh karena itu ia butuh belajar.

Dalam perkembangannya, istilah santri kemudian membentuk pengertian yang lebih luas sebagai kategorisasi dipergunakan untuk Islam di Jawa yang sangat konsisten terhadap ajaran-ajaran agama, sedangkan untuk orang-orang Jawa tradisi dan budaya disebut kaum *abangan* (Geertz, 1976:8). Dalam kategori ini pengertian santri dipertentangkan dengan abangan. Dari pengertian di atas, jelaslah bila kata santri merujuk pada peserta didik, lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Jadi, pesantren adalah sarana pendidikan bagi santri sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren disebut juga pondok pesantren. Penyebutannya lebih dominan sebagai pondok pesantren dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam.

Singkatnya, pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya paling tidak terdapat unsur atau elemen kiai sebagai guru dan pemilik dan pengasuh pesantren, santri sebagai murid, masjid sebagai sarana ibadah dan menuntut ilmu, pondok sebagai tempat tidur santri, serta kitab kuning sebagai buku teks pelajaran (Dhofier, 1994:44).

Dalam pendidikan pesantren, masjid atau halaman asrama (pondok) menjadi tempat pengajaran utama, di mana hubungan antara kiai sebagai pendidik

dan para santri sebagai peserta didik untuk membahas dan mengkaji kitab-kitab ulama masa lampau (*turats*). Buku teks utama ini sering pula disebut sebagai kitab klasik/tradisional, yang dipertentangkan dengan kitab hasil pemikiran ilmuwan Islam modern yang disebut sebagai kitab *'ashriyyah* (modern). Buku teks pesantren salaf disebut sebagai kitab kuning, sebuah buku teks yang ditulis di atas kertas berwarna kuning. Pada masa kini masih melekat penyebutan tersebut terutama di kalangan pesantren meski sebagian sudah dicetak dengan menggunakan kertas putih.

Secara historis, permulaan pesantren masih menjadi teka-teki. Hal ini menunjukkan masih lemahnya dokumentasi sejarah pendidikan Islam masa itu. Paling tidak terdapat dua teori sejarah pesantren dan kemunculannya.

Teori *pertama* menyatakan bahwa pendidikan pesantren, berawal dan muncul dari India. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran Islam di Nusantara dengan menggunakan sistem pesantren sudah dipergunakan oleh umat Hindu di Jawa dalam menyebarkan pendidikannya. Kemudian sistem ini diadopsi untuk penyebaran agama Islam. Dalam kenyataannya, pesantren berasal dari India bukan dari Arab (Karel, 1984:20).

Penyebaran dakwah para wali dalam perkembangannya menggunakan pendidikan pesantren seperti pendidikan Hindu yang kemudian dipergunakan untuk mendidik para santri yang menetap dan menimba ilmu pengetahuan, sebagai sarana pendidikan yang efektif pada masa wali dengan system asrama dan pondok, banyak yang mengadopsi pendidikan pesantren untuk menggembleng para santri dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru nusantara.

Berdasarkan pandangan ini, kehadiran pesantren dianggap mulai muncul ketika penyebaran Islam di Jawa yang dibawa oleh para wali, yaitu tepatnya zaman Walisango menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Diduga kuat pesantren yang pertama kali lahir adalah pesantren yang berada di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur yang dihubungkan dengan perjuangan dakwah Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam (Mujami, 2004:24). Dalam hal ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai pendiri pesantren yang pertama di tanah Jawa, bahkan di Nusantara (Kafrawi, 1978 :17).

Di samping berdasarkan alasan terminologi di atas, bentuk pesantren pada Islam dengan pendidikan Hindu-Budha memberikan penjelasan bahwa teori

ini sangat kuat. Hal ini, tidak terdapat pada pendidikan di Mekkah sebagai basis ilmu pengetahuan Islam. Pendidikan pesantren sangat murni mengajarkan agama Islam, Kyai tidak mendapatkan honor, santri sangat hormat kepada guru, lokasi geografis berada pada wilayah pinggiran jauh dari kota, adalah bukti lain adanya kesamaan tradisi pesantren dengan tradisi pra-Islam di Jawa (Haedari, 2006:22). Pengaruh India sangat kuat dalam pendidikan pesantren di Jawa dengan system pondok, bahwa santri menetap dan berguru kepada Kyai yang memiliki kharismanya.

Teori *kedua* menyebutkan bahwa kelahiran pesantren bukan hasil adopsi atau pengaruh tradisi pengajaran agama Hindu dan Budha di Nusantara hanya saja belum mempertimbangkan bagaimana pesantren di Aceh dan Minangkabau padahal kedatangannya lebih dahulu, namun pendidikannya menyerupai Jawa seperti masjid Khan dan madrasah (Syalabi, 1982:31).

Maka berdasarkan argumen ini kelahiran pesantren adalah berasal dari tradisi yang berkembang di dunia Islam dan Arab. Mahmud Yunus, misalnya, mengemukakan bahwa terdapat pembelajaran mandiri atau privat yang menggunakan metode *bandongan* dengan menggunakan pembelajaran gramatikal bahasa terdapat di Bagdad. Begitu juga tradisi penyerahan tanah wakaf oleh penguasa kepada ulama untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan (Yunus, 1992).

Beberapa teori tentang kemunculan pesantren, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya pesantren dipengaruhi oleh berbagai tradisi: Arab (Timur Tengah), India (tradisi Hindu), dan tradisi asli Indonesia. Ketiga tempat ini dengan tanpa mengabaikan pengaruh dari unsur lain merupakan arus utama dalam mempengaruhi pembentukan sistem pendidikan pesantren. Timur Tengah sebagai tempat asal Islam mengilhami seluruh muatan kurikulum pesantren yang dimulai dengan pelajaran bahasa Arab dan membaca al-Qur'an, sementara India mempengaruhi pada bentuk hubungan guru dan murid yang sangat feodal. Sedangkan tradisi lokal mempengaruhi pada kehidupan gotong royong yang merefleksikan pola kulturil masyarakat Indonesia (Rahardjo, 1995:9).

Jelasnya, pondok pesantren adalah produk penyerapan akulturasi budaya bangsa terhadap budaya Budha-Hindu dengan budaya Islam yang kemudian bermetafora sebagai sebuah institusi lain kekhasan Indonesia, menjadi pembeda pada pendidikan India dan Arab (Purwakawatja, 1970: 212).

Tidak ada kesepakatan kapan mulai munculnya pesantren di Indonesia sampai saat ini masih menjadi teka-teka dan misteri yang belum terungkap secara pasti (Dhofier, 1994:23). Namun, pesantren lebih diidentikkan bagi para pertapa yang menghendaki belajar kepada guru yang menularkan pengetahuannya dengan persyaratan-persyaratan khusus yang harus ditempuh seorang murid (De Graaf & Pigeaud, 2003:275). Bahkan ajaran pesantren ini, lebih cenderung kepada pendidikan agama dan wakaf (Karel, 1984:165).

Pesantren mengalami pertumbuhan pesat di abad 19, hal ini didukung dengan, *pertama*, Pada tahun 1831 Belanda melaporkan tentang institusi pendidikan milik bumi putera telah mencatat jumlah sejumlah institusi Islam tradisional di beberapa kabupaten yang kuat keislamannya, berjumlah 1.853 lembaga dan 16.556 murid (Dhofier, 1994:25). Demikian pula pada tahun 1873 Belanda telah mengungkapkan angka angka pada 20.000-25.000 pesantren dan 300.000 orang santri (Karel, 1984:161).

Data yang berbeda ditunjukkan Van den Berg yang menganalisis pusat statistik Belanda pada tahun 1885 bahwa pesantren sebanyak 14.229 terdapat di Jawa dan Madura (kecuali Yogyakarta) dan 222.663 orang santri (Dhofier, 1994:35). Melihat besarnya jumlah lembaga pendidikan Islam hampir semua tempat belajar terdata, baik itu pesantren, madrasah, langgar dan musholla, dan sebagainya. Akan tetapi, terlepas akuratnya data yang disajikan itu, dapat dikaji bahwa pesantren dan lembaga pendidikan Islam sangat terkendali secara nyata.

Kedua, catatan perjalanan Snouck Hurgronje pada abad ke-19 ke sejumlah daerah Nusantara. data itu menginformasikan bahwa pesantren tersebar tersebar di belahan Nusantara. Bahkan, Snouck Hurgronje berkunjung di Garut, Jawa Barat, dan memperoleh data pesantren Caringin(Haji Muhammad Rafi'i), Pesantren Sukaregang (Kiai Adrangi), dan Pesantren Kiara Koneng (Haji Mu'allim). Daerah lain di Jawa Barat yang dikunjunginya adalah Cianjur, Bandung, Bogor, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan, mencatat pesantren di berbagai wilayah Jawa Tengah serta Jawa Timur. Hurgronje yang membuktikan bahwa pimpinan pernah belajar di Mekkah dan Madinah (Hurgronje, 1891 :7, Bruinessen, 1991:51).

Mekkah dan Madinah (*Haramayn*), dengan demikian, memainkan peran penting untuk melihat pertumbuhan pesantren di Indonesia. Keduanya, di samping Mesir, merupakan pusat kajian Islam sehingga membentuk jaringan ulama dunia dan Indonesia yang sudah terjalin sejak abad ke-17 (Azra, 2005).

Berjejaring antara guru-guru, guru-murid, serta murid-murid, tradisi intelektual Islam yang berkembang di pesantren sangat dipengaruhi oleh wacana keilmuan di pusat itu (Bruinessen, 1991:17).

Melakukan ritual haji dan menuntut ilmu ke Timur Tengah merupakan yang saling memperkuat jaringan internasional intelektual ulama dunia. Semakin tahun jumlah jamaah haji di Indonesia semakin bertambah terlebih lagi pada saat dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 pada abad ke-19 telah membuka Mekkah sebagai pusat peradaban dunia (Noer, 1996:30).

Para pelajar dan muslim dari kepulauan Nusantara di samping bertujuan untuk menunaikan ibadah haji, banyak pula di antara mereka yang kemudian bertempat tinggal untuk menuntut ilmu agama di kota suci Mekkah dan Madinah yang lebih dikenal dengan sebutan komunitas *Jawi*. Bagi orang Indonesia, tempat untuk memperdalam ilmu-ilmu Islam, baik fiqh maupun tasawuf, tidak ada tempat yang paling utama selain Mekah dan Madinah (Bruinessen, 1997:125).

Keterlibatan mereka dalam membangun komunikasi internasional dengan diskusi dan topik- perkembangan Islam Nusantara dan Melayu, terutama dalam membangun pendidikan Nusantara. Semakin menentukan arah dan dinamika perkembangan di Nusantara dan Melayu. Dalam kaitan ini, tokoh-tokoh seperti Syeikh Nawawi al-Bantani (w. 1897), Syeikh Mahfudz al-Tirmisy (w. 1959), dan Kiai Hasyim Asy'ari (w. 1947) merupakan para arsitek pesantren Indonesia (Mas'ud, 1997:7).

Penting untuk ditambahkan, penelusuran Martin van Bruinessen membawa kesimpulan bahwa pada abad ke-19 telah dirumuskan kurikulum yang bersifat universal bagi berlangsungnya pesantren di Nusantara, dan para ulama Hijaz mendominasi dalam mempengaruhi tradisi Islam di Nusantara. Dengan demikian, diketahui berlangsung selama dua abad, para ulama Jawi memberlakukan standar pendidikan pesantren di kawasan Nusantara menyerapnya dengan baik (Wahid, 1995:13).

Melalui komunitas Jawi ini, budaya keilmuan pesantren dan lembaga Islam di Melayu-Nusantara, menjadi terintegrasi ke dalam sistem arus utama perkembangan Islam Nusantara yang berafiliasi dengan Islam di Timur Tengah. Indikatornya adalah membludaknya buku-buku ulama klasik yang dipergunakan oleh ulama Nusantara sebagai kajian pendidikan pesantren, terutama pada mazhab Syafi'i (Bruinessen, 1991:42). Dengan demikian, jaringan ulama

Nusantara dan Timur Tengah ini menggambarkan pembentukan asal-usul tradisi keilmuan di pesantren pada gelombang kedua. Gelombang pertama pembentukan tradisi keilmuan berlangsung sewaktu kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara.

Jika ditilik kemunculan pesantren sangat sederhana. Keegiatannya berawal dari Masjid untuk ibadah dan pendidikannya, kemudian berkembang kebutuhannya tempat menginapnya santri yang mondok. Kya belajar di Mekkah dan Madinah dalam menuntut ilmu, kemudian mereka praktekkan dalam pembelajaran dan system pondok di Nusantara. Kemudian dalam perkembangannya pesantren menjadi basis keagamaan dan pendidikannya sepanjang masa bagi santri mukim dan santri kalong.

Pondok pesantren berkembang dari hanya beberapa santri saja, Kyai dan santrinya selalu shalat berjamaah, kemudian memberikan ceramah keagamaan dan pengajaran kepada santrinya, memberikan ceramah keagamaan seputar rukun Islam, rukun iman, akhlak, dan amaliah kehidupan sehari-hari. Ketekunan dan kealimannya menjadikan semakin banyaknya santri yang menetap dan bermukim untuk belajar, mengikuti dan meneladani Kyainya, dan belajar dengan kesungguhan hatinya dengan penuh penghormatan kepada gurunya tersebut.

Alumni yang telah selesai menempuh pendidikan pesantren, pulang ke rumah dan kembali ke asalnya mendirikan pesantren dan mengikuti perkembangan zaman dan situasi masyarakatnya dan melanjutkan tradisi-tradisi yang sudah distandarkan para ulama dengan mengikuti pendidikan-pendidikan yang berlangsung secara turun temurun.

Pesantren sebagai penempatan kader ulama dan memberikan estafet perjuangan para ulama sampai saat ini masih berlangsung dan dipertahankan. Perkembangan penting terjadi pada pesantren pada tahun 1910 di mana beberapa pesantren antara lain pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur mulai menerima santri perempuan dengan membuat pondok khusus terpisah dari pondok laki-laki. Pesantren Jombang dan pesantren Singosari Malang memasukkan kurikulum dengan mata pelajaran bahasa Niderland, ilmu alam, ilmu menghitung, ilmu *tarikb* dan bahasa Indonesia itu terjadi pada tahun 1920 (Dhofier, 1994 :38).

Dengan mengadopsi sistem madrasah ini, pesantren dapat memetik hasil positif untuk menghalau menjamurnya sekolah Belanda yang semakin

merebak. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, jumlah santri di suatu pesantren melonjak tajam, misalnya pesantren Tebuireng yang semula mempunyai sekitar 200 santri saja tetapi pada awal dekade 1930-an memiliki santri lebih dari 1500 orang. Akan tetapi, pengaruh dominan dari pesantren mulai menurun drastis semenjak penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia pada bulan Desember 1949. Setelah penyerahan ini pemerintah semakin mengintensifkan pembukaan sekolah-sekolah umum. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah peminat pesantren, mereka lebih tertarik pada sekolah-sekolah umum. Pada periode ini, kebanyakan pesantren kecil mati, dan pesantren besar mulai melakukan pengintegrasian SMP dan SMA dalam lingkungan pendidikannya (Dhofier, 1994:40).

Perkembangan zaman menuntut perubahan pesantren yang tidak boleh tergerus oleh keadaan, apalagi pada situasi era digitalisasi saat ini telah memberikan warna pesantren dengan kekhasan yang selalu muncul ke permukaan untuk selalu andil dalam percaturan global, dunia yang semakin tak menentu arah dan nilai kehidupannya telah menjadi tantangan bagi pesantren dengan performa dan bentuk yang semakin dikondisikan dengan masanya, perubahan tidak boleh mundur, namun harus dihadapi dengan pengetahuan yang mapan dan pendirian yang kuat.

B. Komponen Terbentuknya Pesantren

Komponen-komponen yang membentuk sebuah pesantren meniscayakan adanya asrama pondok, masjid, pengajaran kitab kuning, santri, dan guru. Beberapa pesantren terdapat madrasah dan sekolah yang menjadi basis tempat menimba ilmu pengetahuan keagamaan Islam. Elemen pesantren ini dapat, sebagai berikut:

1. Asrama Pondok

Pondok pesantren itu memiliki sarana pondok sebagai tempat penginapan dan belajar para santri, tempat santri beristirahat setelah mendapatkan pengajaran dengan jadwalnya yang rutin. Pemandokan bagi santri menjadi ruang yang sangat baik dengan bilik-biliknya sebagai sarana beribadah dan menghafal beberapa pelajaran, bahkan tempat bermunajat dalam setiap keheningan malamnya. Pemandokan sekaligus rumah Kyai memberikan sarana yang mendukung dalam proses keteladanan Kyai, yang sangat didolakan santri, santri tanpa Kyai menjadi hampa, karena tidak ada tempat untuk mendapatkan

amaliah sehari-hari seorang figuran yang cocok dalam hati sanubari santri selain Kyainya, bahkan termasuk keluarga santri menjadi tokoh yang menjadi panutan dan harus dihormati. Bilik-bilik zikir dan doa selalu di panjatkan kehadirat ilahi setiap waktu dan saatnya, bahkan dalam pandangan beberapa santri tempat ini disebut sebagai penjara suci, memenjarakan santri untuk berlaku baik dan menahan segala amarah dan emosi.

Sistem pondok pesantren mengharuskan santri menetap dan bermukim dalam ruangan pondok dengan berbagai fasilitas seadanya, berbeda dengan pendidikan *surau* yang ada di Minangkabau. Pondok pesantren didirikan memiliki empat dasar dalam pembangunannya, yaitu: *pertama*, Kyai sebagai untuk mengajarkan pengetahuannya yang dalam memberikan kekuatan bagi santri untuk menetap dan bermukim, santri tidak ingin ketinggalan dalam setiap momen dan peristiwa pembelajaran yang berlangsung di pondok pesantren, sehingga santri harus mondok agar tidak ketinggalan pengajiannya. *Kedua*, pondok pesantren sebagai tempat penggemblengan dan pendadaran moral terkadang sangat jauh dari hiruk pikuk kota dan kemewahan masyarakatnya yang *hedonisme*. *Ketiga*, Santri dan Kyai membangun hubungan timbal balik yang berlanjut, bahkan setelah santri sebagai alumni, terbangun hubungan ayah dan anak, sepanjang waktu dan berlangsung seumur hidup (Dhofier, 1994:46).

Keempat, pendidikan pesantren berlangsung selama 24 jam, setiap hari santri selalu berada dalam pengawasan Kyainya dan menjadi perhatian utama Kyai dalam memberikan pendidikannya sepanjang waktu, karena proses pembelajaran bukan hanya sebatas dalam ruang kelas tapi juga setiap aktivitas santri adalah pembelajaran, tidur dan bangun tidur, memasak, makan dan mandi, keluar dan berbelanja untuk keperluan sehari-hari.

2. Adanya masjid

Masjid menjadi elemen penting dalam kegiatan pendidikan kepada santri, dalam melaksanakan ritual ibadah shalat lima waktu, pengajian kitab kuning, mengajarkan dakwah khutbah Jum'at, pendidikan shalat Sunnah, dan memberikan informasi tentang keagamaan, basis zakat dan wakaf, serta memberikan bimbingan ibadah haji, masjid menjadi tameng bagi setiap umat Islam bagi musafir dan tempat iktikaf, santri dididik untuk berkenalan dengan pengetahuan Islam sebagaimana dalam dakwah nabi Muhammad saw yang berangkat dan berawal dari masjid dalam menyebarkan dan mengajak kepada umat manusia kepada Allah swt. (Syalabi, 1954:47).

Nilai-nilai perjuangan nabi Muhammad swt telah berkembang menjadi kekuatan yang sangat tinggi melalui masjid, masjid dibangun dengan sangat indah sebagai wujud nyata keindahan Allah swt, masjid agar selalu bersih sebagai wujud nyata, kebersihan sebagian dari iman, nilai-nilai Islam yang disampaikan Rasulullah saw, berkembang menjadi nilai-nilai universal yang selalu menjadi daya tarik tersendiri yang akan menjadi minat untuk orang yang baru mengenal Islam, santri selalu bermunajat dalam masjid dengan penuh kekhusu'an, dengan doa-doa yang diajarkan Kyai. Dengan demikian masjid menjadi tempat untuk menenangkan jiwa setiap santri dalam menempa batinnya agar bisa *musyabadah* dengan Tuhannya. Kehadiran masjid sangat penting dalam menciptakan kenyamanan santri untuk beribadah.

Dengan demikian, masjid memiliki fungsi ganda, selain sebagai tempat untuk menunaikan shalat dan ibadah lainnya juga menjadi tempat pengajian kitab kuning dengan metode *sorogan* dan *bandongan*. Masjid memiliki peran sentral sebagai tempat pendidikan dan sebagai tempat ibadah, bahkan berperan sebagai pusat dakwah Islam. Sehingga, masjid memberikan tempat yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan sarana spiritual santri, seperti panggung wayang kulit yang terlihat berjejer di tengahnya gunung (Mujamil, 2007:21).

3. Pengajaran Kitab-kitab Kuning

Pada dasarnya, keseluruhan kitab kuning mengandung kitab yang sangat varian, di dalamnya terdapat kajian fiqh, ushul fiqh, tafsir, balagoh, hadits nahwi, shorof, tarikh dan *mantiq*. Kitab-kitab ini ditulis dalam bentuk teks dari mulai yang tipis hingga kitab tebal yang ditulis berjilid-jilid. Kitab-kitab ini berdasarkan keluasan cakupannya, dikelompokkan menjadi kitab dasar, kitab tingkat menengah, serta kitab besar (Dhofier, 1994:50).

Kitab kuning diajarkan bertujuan untuk menghasilkan santri yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan Islam sehingga menjadi ulama. Sementara santri yang belajarnya hanya sebentar, bukan untuk menjadi ulama, tetapi hanya untuk mempelajari dasar-dasar ajaran Islam. Kitab kuning diajarkan merupakan ciri khas pesantren salaf. Pembelajaran kitab kuning di pesantren memiliki akar geneologi yang bersumberkan pada tradisi keilmuan dalam Islam. Ini hampir sama dengan kurikulum madrasah dalam abad pertengahan yang didominasi oleh pengajaran ilmu-ilmu keagamaan (Makdisi, 1990:75). Ilmu-ilmu keagamaan ini pun dipersempit lagi pada pengajaran fiqh dengan berbagai keragamannya, khususnya fiqh dalam madzhab syafi'i (Bruinessen, 1991:117).

4. Santri (murid)

Dalam masyarakat pesantren, penyebutan santri merupakan istilah yang merujuk kepada pengertian murid, yakni orang yang belajar. Secara umum terdapat dua kelompok santri, yaitu santri *mukim* dan santri *kalong*. Santri mukim adalah santri yang datang dari berbagai wilayah kemudian menetap dan berguru kepada Kyai. Sedangkan santri *kalong* adalah santri yang datang dan pergi hanya untuk mengaji kemudian kembali ke tempat asal mereka, dan biasanya ini hanya untuk santri yang dari daerah terdekat (Dhofier, 1994:51).

Para santi memulai dan menjalani kehidupan di dalam pesantren kemampuan santri dalam menguasai kitab kuning disesuaikan dengan kemampuan mengajinya, jika santri semakin tinggi dalam penguasaan kitab kuning maka akan mendapatkan pengajian yang levelnya tinggi. Santri akan semakin terlihat sangat baik dalam mendapatkan pengajaran dan pendidikan pesantren sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penguasaan kitab kuning. Kemampuan santri akan berpengaruh terhadap kecepatan membaca kitab, sementara santri yang lambat dalam membaca kitab kuning akan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya itu. Semakin mampu membaca kitab kuning, maka akan semakin banyak menguasai kitab kuning dibandingkan dengan santri yang lambat membaca kitab kuning. Sehingga banyak santri yang cepat selesai dalam menempuh pengetahuan kitab kuningnya dengan kemampuan dalam penguasaan kitab kuning tersebut (Karel, 1984:11).

5. Kiai (guru)

Di antara elemen-elemen sebuah pesantren, Kyai sentral pendidikan pesantren, tidak ada Kyai maka tidak ada pesantren. Kyai menjadi perumus kurikulum pesantren yang setiap materi pelajarannya selalu bermunajat kepada Allah swt agar ilmu yang diajarkan kepada santri menjadi manfaat dunia dan akherat, materi pelajaran disampaikan kepada santri sesuai dengan kemampuan santrinya, pendidikan pesantren yang dirumuskan Kyai selalu bernilai ibadah dengan muamalah kehidupan sehari-hari yang praktis. Materi yang diberikan kepada santri memberi dampak positif bagi kehidupan pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Clifford Geertz menurutnya peranan Kyai sangat besar dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang disebut sebagai *great traditions* dan *little traditions*. Masyarakat akan selalu mendapatkan pencerahan tentang Islam dari Kyai dimana

Kyai berperan sebagai juru bicara dalam persoalan Islam. Bisa dikatakan Kyai sebagai reformis Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat berkenaan dengan ajaran Islam. Peranan ini oleh Geertz disebut sebagai pialang budaya (*cultural broker*) (Geertz, 1960:228).

Masalah agama selalu menjadi titik tolak dalam menjembatani persoalan masyarakat dalam *muamalah* kehidupan. Akan tetapi, menurut catatan Nico Kaptein, dominasi ulama secara individual dalam memberikan fatwa berakhir memasuki abad ke-20. Ini merupakan implikasi dari semakin banyaknya jumlah masyarakat muslim terpelajar serta tumbuh pesatnya literatur keislaman. Fatwa-fatwa yang muncul kemudian mengatasnamakan institusi keislaman, seperti MUI (Majlis Ulama Indonesia) (Mudzhar, 1993), NU (Nahdhatul Ulama), Muhammadiyah, dan seterusnya (Subhan, 1993:78). Meski demikian, otoritas kiai tetap kuat, khususnya di kalangan pesantren sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Di dalam kalangan pesantren kiai memegang peranan sangat penting mempengaruhi pesantren dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Kiai merupakan pendiri atau merupakan estafet yang meneruskan sang pendiri tadi yang dapat menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan serta model dan bentuk pesantren. Seringkali pertimbangan utama seseorang dalam menentukan pesantren pilihannya sebagai tempat belajar merupakan tokoh besar pesantren dan kemasyhuran Kyai. Penentuan besar atau kecilnya serta popularitas pesantren kerap kali juga dihubungkan dengan kebesaran kiai pendiri atau pengasuhnya tadi.

Kyai menjadi rujukan santri dalam menentukan arah dan aktivitas santri, bahkan meneladani kehidupan santri sepanjang hidup. Kyai sebagai otang tua yang harus dihormati dan dihargai. Perilaku dan sikapnya menjadi teladan bagi santri-santrinya, kehidupannya menjadi buah bibir santri. Keteladanan hidup Kyai selalu mencuri perhatian santri, karena berharap keberkahan dan kebermanfaatn ilmu yang telah didapatkannya.

Ta'lim al-Muta'allim kitab tentang akhlak santri yang dikarang Syeikh al-Zarnuji, kitab fenomenal sepanjang pesantren itu ada, karena mengajarkan penghormatan santri kepada guru, mengajarkan tidak boleh berjalan di depan gurunya, tidak boleh mendahului berbicara sebelum diberikan izin, menghormati gurunya dan keluarganya, mengajarkan kasih sayang kepada teman sebaya dan mencari teman yang layak untuk dijadikan teman dan menjauhi teman yang malas dalam belajar.

Segi mistis ini oleh Nucholish Madjid dipandang mempengaruhi kitab kuning yang diajarkan kepada santri tidak seharusnya berlebihan dalam mengaji dan menghafalkan teks-teks kitab kuning itu, namun santri harus bersikap sewajarnya saja (Madjid, 1997:24).

Untuk mengelola pesantren, terkadang hanya dilakukan oleh seorang kiai dengan dibantu oleh beberapa orang ustadz saja. Pada pesantren yang sudah agak besar, pengelolaan dilakukan oleh beberapa orang kiai yang masih dalam satu keluarga besar dengan dipimpin oleh seorang kiai *sepuh* (senior). Dalam hal ini, fungsi para ustadz adalah sebagai pengajar para santri untuk tingkat pemula dan menengah di bawah bimbingan dan kontrol kiai. Proses regenerasi kepemimpinan di pesantren pada umumnya menganut sistem pergantian secara geneologis, turun temurun. Sistem ini dinilai hanya cocok untuk pesantren tradisional yang sangat mengandalkan pada kepemimpinan tunggal kiai. Jika pesantren dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh kehidupan modern atau kemodernan, maka hal itu dapat menjadi salah satu titik lemah pesantren (Madjid, 1997:96). Kemampuan pesantren untuk dapat merespon tantangan tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur seberapa jauh pesantren dapat mengikuti arus modernisasi (Madjid, 1997:88).

C. Tipologi Pesantren

Muhaimin (2002:298) menyatakan bahwa terkait dengan elemen-elemen dasar yang membentuk sebuah pesantren meski pada dasarnya sama, namun pada kenyataannya terdapat beberapa varian atau model suatu pesantren. Secara garis besar varian pesantren dapat dikelompokkan dalam tiga macam tipe pesantren berikut:

1. Pondok pesantren tipe A, mempunyai khasnya:
 - a) Kyai dan santri bertempat tinggal di pesantren
 - b) Tidak memberikan aturan secara terbuka, tapi kurikulum bersifat insidental dan tersembunyi
 - c) Metodologis pembelajaran pesantren sangat kental dengan pendekatan yang umum dalam pesantren seperti *sorogan*, dan *bandongan*.
 - d) Penyelenggaraannya dalam pesantren menggunakan *madrasi*.
2. Pondok pesantren tipe B, mempunyai khasnya:
 - a) Santri menetap di pondok pesantren
 - b) menggunakan system sekolah.
 - c) memiliki kurikulum terbuka dan jenjang pendidikan yang berkelas-kelas

- d) terdapat ruangan kelas belajar yang memadai
- 3. Pondok pesantren tipe C, mempunyai khas:
 - a) Asrama berada dalam pondok pesantren
 - b) Sekolah berada di luar pesantren.
 - c) Kegiatan belajar santri hanya waktu sore atau malam hari
 - d) Kegiatan pembelajaran pada umumnya tidak terprogram dalam kurikulum yang jelas dan baku.

Saridjo, Marwan., dkk. (1982) menyatakan bahwa pengelompokan terhadap pesantren terkadang dilakukan dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pesantren. Berdasarkan identifikasi ini terdapat lima tipologi, yaitu:

Tipe pertama, pesantren yang terbagun dari masjid dan rumah kiai. Pesantren yang sangat sederhana karena terdiri dari masjid dan rumah Kyai sebagai sarana pengajaran dan rumahnya sendiri sebagai tempat pengajarannya. Santri tidak menetap disini, namun banyak mempelajari kegiatan pendidikan pengajaran dari Kyai sehingga tidak dikatakan sebagai pesantren tapi sebagai tempat pengajian Al-Qur'an sebagaimana pada mushala dan langgar.

Pada tipe kedua, pesantren yang memiliki pondok, rumah Kyai dan masjid, pendidikan yang disampaikan pada tipe ini bisa saja terjadi di rumah Kyai dan di pondok, pengajarannya berlangsung setiap waktu, karena santri belajar setiap waktu dan berada dalam pondok, masjid sebagai sarana tempat ibadah bagi santri dan Kyai, masjid sebagai tempat penggemblengan shalat lima waktu dan ritual ibadah lainnya. Tipe ini sudah dikatakan sebagai pesantren.

Tipe ketiga, terdapat masjid, rumah Kyai dan pondok. Pendidikannya diberlakukan secara berjenjang dan bertahap, pesantren memberikan pengetahuan bukan hanya keagamaan, tapi pengetahuan umum, sehingga santri memperoleh tambahan pengetahuan yang lengkap, pengajarannya dilakukan dengan jadwal-jadwal rutin pengajaran kitab kuning.

Tipe keempat, pesantren yang menyampaikan pengetahuan bukan hanya keagamaan, tetapi juga memberikan bekal-bekal keterampilan yang mumpuni sebagai bekal masa depan santri, misalnya bercocok tanam, menjahit, beternak, dan desain-desain grafis serta keterampilan yang mendukung kegiatan pondok.

Tipe kelima, tipe ini sudah sangat maju dan berkembang pesat, pesantren memiliki sarana-sarana kantor, aula, olah raga, dan internet, pesantren tipe ini

memberikan akses kemudahan bagi santri dalam menuntut ilmu, pesantren tipe ini sangat memanjakan santri, namun terkadang mengabaikan kemandirian santri, seperti memasak dan mencuci baju sendiri harus difasilitasi dalam model pesantren tipe ini.

Pembagian yang cenderung mendeskripsikan pesantren dari segi kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki pesantren seperti ini, dalam kenyataannya tidak dapat diterapkan secara ketat dan kaku. Perkembangan dan tingkat kemajemukan pesantren yang spektrumnya demikian amat luas, menyebabkan masih dimungkinkannya tipologi-tipologi lain. Namun, paling tidak untuk dapat disebut sebagai pondok pesantren minimal memiliki tiga elemen utama, yakni adanya Kyai yang memberikan ngaji kitab, diberikan kepada santri yang menetap di pondok, serta adanya masjid sebagai tempat ibadah dan tempat mengaji (Saridjo, dkk. 1982:9).

Institusi pesantren terkadang juga dikelompokkan kepada pesantren besar dan pesantren kecil (Karel, 1984:16). Pengelompokan ini didasarkan pada jumlah santri yang dimiliki santi lebih dari 3.000 santri berada di kategori pesantren besar, berlaku secara fleksibel. Sementara jumlah 1.000 santri biasanya karena memiliki Kyai yang sangat berpengaruh dan menjadi panutan banyak orang. Besar kecilnya pesantren bergantung bagaimana pengaruh dan dominan Kyai di mata masyarakatnya (Wahid, t.t:25).

Dari berbagai deskripsi polarisasi dan tipologi pesantren di atas, klasifikasi pesantren ke dalam pesantren *salaf* (tradisional) dan pesantren *kehalaf* (modern), Dhofier, (1994:41) agaknya paling banyak diminati, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis. Sebuah pesantren digolongkan sebagai pesantren *salaf* menggunakan system pengajaran klasik yang hanya menggunakan kitab kuning. Sedangkan pesantren *kehalaf* pesantren yang tetap melestarikan unsur-unsur utama pesantren, yakni *boarding system* dan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, memasukkan juga unsur-unsur sistem pendidikan modern, yakni sistem pembelajaran klasikal serta pengajaran pengetahuan umum. Pada pesantren ini sistem *madrasi* (sekolah) merupakan perbedaan utama, di samping penekanan yang kuat pada pengajaran bahasa asing. Dengan demikian pesantren modern merupakan pembaharuan pada segi-segi tertentu pesantren yang diadopsi dari sistem sekolah.

Meskipun demikian, secara umum keberadaan pesantren mempunyai ciri khas sebagai berikut: *pertama*, pesantren hadir karena dukungan masyarakatnya,

kedua, pesantren menyelenggarakan pengajarannya menuntut keadilan, tidak melakukan diskriminasi baik kaya ataupun miskin, tidak ada perbedaannya, *ketiga*, pesantren bertugas untuk memberantas buta huruf dan menghilangkan kebodohan *tafaqquh fi al-dîn* serta menyebarkan agama Islam.

D. Keunikan Pembelajaran Pesantren

Apabila ditinjau dari pengamatan orang luar, pesantren menunjukkan dan memiliki watak subkultur. Beberapa aspek utama dari kehidupan pesantren yang dianggap memiliki watak subkultur, yaitu: *pertama*, keberadaan pesantren memberikan pengajaran yang tidak berlaku secara umum, *kedua*, proses pembelajaran pesantren membentuk penataan nilai yang sarat dengan lambing dan simbolnya, dan menjadi alternative pendidikan yang ideal dalam menciptakan tatanan nilai masyarakat yang bermoral, dan memberikan warna yang membangun kehidupan dengan nilai-nilai masyarakat yang penuh dengan pendidikan akhlak (Rahardjo, 1995:39).

Salah satu keunikan pesantren adalah karakteristik pendidikannya yang masih tetap mempertahankan nilai-nilai ketradisional di tengah derasnya arus modernisasi. Penekanan yang sangat kuat pada pengajaran ilmu-ilmu agama *tafaqquh fi al-dîn* daripada pengetahuan umum merupakan salah satu wujud ketradisional pesantren. Pesantren bertujuan untuk membangun moralitas dan akhlak mulia, menjaga nilai-nilai spiritualitas keagamaan, berlaku jujur, bertanggung jawab dan memberikan pengetahuan kemandirian dan hidup sederhana serta selalu membersihkan hatinya untuk berpikir positif dari perasangka-perasangka buruk (Dhofier, 1994:21).

Dari tujuan ini tampaknya pesantren lebih mengutamakan pada pendidikan aspek afektif (sikap) daripada penguasaan ilmu pengetahuan (kognisi) dan teknologi (ketrampilan) para santri, di samping melakukan fungsi reproduksi ulama, tempat pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan, serta pemelihara tradisi Islam (Azra, 2005:104).

Dalam masyarakat pesantren, buku-buku yang dipergunakan sebagai sumber pengetahuan dibedakan penyebutannya berdasarkan bahasa yang dipergunakan dalam buku itu. Tulisan buku yang berbahasa para santri menyebutnya sebagai kitab semantara tulisan Indonesia menyebutnya buku, nilai penghargaan santri kepada kitab lebih besar dibandingkan kepada buku. Kitab-kitab yang diajarkan sesuai dengan kondisi kemampuan santri secara berjenjang

dan bertahap, pada umumnya berkisar pada bidang-bidang ilmu, Bruinessen (1991:148) berikut:

1. Ilmu-ilmu Alat: nahwu, sharaf, balaghah, dan seterusnya
2. Fiqh dan Ushul Fiqh
3. Doktrin (*Tawbîd, 'Aqâ'id, Ushuluddin*)
4. Tafsîr al-Qur'an
5. Hadîts
6. Akhlaq dan Tasawuf
7. Tarikh Islam dan Kitab Puji-pujian kepada Nabi
8. Kitab-kitab tambahan, misalnya mujarabat

Kitab-kitab ini diajarkan dengan menggunakan sistem *halâqah*, dengan menggunakan metode *sorogan* atau *bandongan*. Penerjemahan ke dalam bahasa Jawa atau Bahasa Daerah karena santri memiliki keterbatasan untuk memahami literature kitab yang murni berbahasa Arab, pengajarannya dengan pengenalan dasar tata cara membaca kitab kuning melalui kitab alat seperti *nahwu* dan *shorof*. Para santri diajarkan *mubtada* sebagai permulaan dengan makna Jawa *utawi* yang selalu membutuhkan *Khobar* dimaknai dengan *iku*, setiap kalimat *fill* pasti memerlukan *fail*, dan beberapak kalimat yang harus *muta'adi* dan kalimat yang harus *lazim* (Madjid, 1997:22).

Pembelajaran pemaknaan Jawa dari kitabnya didengarkan secara seksama sehingga santri tidak ketinggalan, bahkan para santri menuliskannya dalam kitab-kitab samping matannya, untuk mempermudah kalimat dalam yang sukar dicerna ketika menjabarkan suatu kalimat. Penjabaran kata perkata dan menjelaskan kalimat dalam suatu kitab terkadang membutuhkan catatan tersendiri, sehingga santri menyiapkan kertas kosong untuk menjabarkan secara detail dari Kyainya apa-apa yang terkandung dalam maksud dan tujuan suatu kalimat yang masih sukar dipahami. Tetapi terkadang, Kyai tidak menjelaskan maksud dari kalimat yang tersembunyi karena banyak factor, biasanya mengandung maksud yang sangat dalam dan memerlukan penjabaran dalam ruang yang berbeda (Madjid, 1997:23).

Penerjemahan tidak menggunakan huruf latin atau tulisan berbahasa Indonesia, akan tetapi menggunakan huruf *pegon*. Penggunaan huruf *pegon* bermaksud untuk menunjang kebiasaan santri dalam menggunakan huruf-huruf Arab, tulisan *pegon* bertuliskan Arab hanya saja membacanya dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah, sampai saat ini banyak yang menggunakan huruf *pegon* dari

tatar Sunda, sehingga penulisannya Arab tapi membacanya dengan bahasa Sunda, atau bahasa daerah lainnya. Penerjemahan ini membantu santri yang masih pemula, santri yang pemula sangat memerlukan untuk menunjang pembelajaran mereka, kecuali santri yang sudah lama dan paham mereka menggunakan kitab-kitab kuning yang tidak bermakna.

Pengajaran yang memerlukan waktu yang lama, karena proses penerjemahan yang harus dilalui dengan penuh kesabaran, bahkan pemahaman yang kuat dan hafalan yang mendukung, memberikan kemudahan bagi santri untuk berkembang dan mempermudah proses pembelajaran secara berkelanjutan, tetapi proses ini sangat lama sehingga banyak santri yang harus menetap puluhan tahun untuk mempelajari satu kitab, santri yang sudah mampu dan mengkhatakannya fan-fan keilmuan maka diberikan ijazah untuk menyebarkan kitab kuning kepada orang lain.

Pengajaran yang disampaikan dari Kyai kepada santri melalui pengajian, tanpa tekanan dan control tanpa tes dan evaluasi serta ujian, santri bebas melaksanakan pembelajarannya untuk mendapatkan informasi pengetahuan dari gurunya dengan sukarela, namun terkadang Kyai memberikan kesempatan kepada santrinya untuk bertanya dan berdiskusi dibawah pengawasan gurunya, santri bebas berpendapat dan menguraikan argumentasinya secara terbuka.

Sistem pembelajaran di kalangan pesantren yang umumnya mengandalkan pada kajian kitab kuning oleh para pemerhati pesantren dianggap merupakan sisi kurang berkembang. Pandangannya menganggap bahwa tuntutan pesantren terhadap kitab kuning sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, yang pembelajarannya sangat berat dan membutuhkan waktu yang lama. Pesantren memerlukan daya tariknya dengan menambahkan pengetahuan umum dan materi yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi santri dalam menapaki kehidupan masyarakatnya.

Pesantren kecil Kyai mengajarkan kitab-kitab dasar, sementara pesantren besar Kyai mengajarka kitab-kitab tertentu. Kyai memberikan materi sesuai dengan pandangannya dan memberikan komentar terhadap persoalan yang aktual dalam kehidupan. Pandangan Kyai ini memerlukan pengetahuan yang sangat luas, dan memberikan gambaran yang utuh terhadap berbagai persooalan yang terjadi pada saat ini dan asumsi-asumsinya pada masa yang akan datang, menjelaskan peristiwa masa lampau sebagai sebuah pelajaran dan pengalaman hidup.

Pada awalnya, sistem pendidikan di dalam pesantren tidak mengenal sistem klasikal, karenanya jauh dari bentuk pendidikan formal. Pembelajaran umumnya dilakukan dengan menggunakan metode *sorogan* dan *bandongan*. Tingkatan kemampuan seorang santri diukur berdasarkan seberapa banyak kitab kuning yang ia kuasai serta jenis-jenis ilmu yang dipelajarinya. Dalam sistem pembelajaran ini, ilmu-ilmu alat (nahwu dan sharaf) menjadi pelajaran awal bagi seorang santri di samping pembelajaran al-Qur'an. Setelah itu meningkat pada pelajaran fiqh, aqidah, akhlaq, hadits, serta tafsir al-Qur'an.

Pelajaran terhadap suatu materi tertentu tidak cukup hanya dengan menuntaskan satu buah kitab saja. Pelajaran nahwu, misalnya, seorang santri terlebih dahulu mempelajari kitab *Matn* Jurumiyah, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari kitab Nadzam 'Imriti atau kitab Mutammimah. Setelah itu dilanjutkan dengan kitab Alfiah ibn Malik. Demikian juga berlaku pada bidang-bidang ilmu lainnya. Pada praktiknya, pembelajaran dikombinasikan antara bidang ilmu yang satu dengan lainnya, misalnya kitab tentang fiqh. Ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mempraktikkan kemahiran tata cara bahasa yang dimiliki seorang santri (Bruinessen, 1991:151).

Pada prinsipnya muatan kurikulum pesantren mengandung materi pelajaran dalam bentuk kitab kuning, pendidikan di pesantren tidak mengenal batas waktu untuk penerimaan santri baru, lamanya waktu belajar untuk santri, serta tamatnya santri yang tidak ada batasnya. Pengajaran menghafal paling efektif untuk memperkuat identitas kesantrian, misalnya santri harus hafal kitab Alfiah jika tidak hafal maka belum sempurna sebagai seorang santri, santri harus hafal kitab shorof jika tidak hafal maka tidak sempurna sebagai seorang santri.

Pesantren mencatek kader *tafaqqub fi al-din* secara mendalam, menghayati dan mengamalkan dengan ikhlas setiap perilaku dan perbuatan yang hanya kepada Allah swt, pesantren memberikan jalan pengetahuan yang penuh kesabaran dalam menapaki kehidupan. Pesantren sebagai basis kader ulama yang menguasai ilmu agama dan mengajarkan pemahaman hidup secara sempurna. Secara sederhana bahwa pesantren mengajarkan *Alquran, Tafsir, Hadits beserta ilmu Hadits, fiqh dan Ushul fiqh, Tanbid, Tarikh, Akhlak dan Tasawuf, Nahwu, Sharaf, Ilmu ma'ani, Ilmu Badi', Bayan serta Mantiq* kepada para santinya. Pesantren menerapkan pendidikannya berbasis kitab kuning menghasilkan luaran yang sangat penting bagi masyarakat sekitar dan memberikan andil dalam percaturan yang sangat urgen untuk menata kehidupan social.

Pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode, namun yang paling sering digunakan adalah ceramah dan diskusi pada waktu yang berbeda dikenal dengan nama musyawarah, metode musyawarah diberikan kepada santri untuk memperkuat dan mempertajam keilmuan dan argumentasi santri. Pembelajaran yang sangat dalam penguasaan kitab kuning dengan memberikan pengetahuan *nahwu shorof*, sebagai dasar pengetahuan untuk menguasai kitab kuning secara menyeluruh.

Wahid (2001 :55) menyatakan bahwa pendidikan tradisional yang menjadi ciri dari pesantren, antara lain:

1. Materi diberikan secara terstruktur dan berjenjang. Ciri utama dari pengajian tradisional ini adalah cara pemberian pengajarannya, baik dalam pendidikan formal di sekolah/madrasah maupun dalam *halaqah* dengan sistem *sorogan* dan *bandongan*, pada penekanan pemahaman kata perkata, membaca kitab dengan memaknai kitab dengan penekanannya pada pemahaman *nahwu shorof*.
2. Menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat dengan membangun moralitas dalam pesantren.

Pembelajaran pesantren yang dilakukan secara klasikal menjadi identitas pesantren dengan model-model yang sesuai dengan perkembangan dan potensi santri, pembelajarannya terkadang dilakukan secara terpadu, mengembangkan pesantren model sekolah dengan pengajian klasik, modifikasi ini sudah mulai menjamur seperti klas-klas kitab yang sesuai dengan pemahaman santri dalam satu fan keilmuan, memberikan kemudahan dalam menargetkan suatu kitab yang harus ditempuh dalam kurun waktu tertentu.

Kemampuan santri dalam menguasai suatu kitab menentukan santri untuk berada dalam kelompok kelas yang diinginkannya. Namun, sesuai dengan tingkat kesukaran dan kemudahan yang harus diperoleh dan memberikan jalan dalam menentukan santri untuk berbuat sesuai dengan tingkatan pembelajarannya. Secara garis besar pengelompokan dilakukan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kelompok kitab kecil atau kitab-kitab dasar, kelompok kitab sedang atau kitab tingkat menengah dan kitab besar atau kitab untuk tingkat tinggi.

Bagi santri pemula diajarkan kepada mereka kitab-kitab kecil (*mabsûthât*) yang berisikan teks ringkas dan sederhana serta jumlah halaman yang sedikit. Kitab-kitab kecil yang dipelajari para santri pemula ini mencakup obyek kajian pada bidang fiqih, akhlak, nahwu, dan sharaf. Mereka memilih sendiri kitab-kitab

kecil itu dan menyesuaikan dengan jadwal pengajian yang telah ditentukan oleh seorang kiai atau wakilnya, para ustadz. Santri tidak akan meningkatkan levelnya sebelum menamatkan kitab, sehingga santri harus belajar tuntas sampai batas waktu selesai dibacakannya suatu kitab oleh Kyai.

Kitab kuning harus ditempuh sampai tuntas, pembelajaran model ini, tidak asal sesuai target, namun sampai kepada pemahaman mendalam dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dilakukan untuk mempermudah saja, bukan selesai, karena masih banyak kajian yang memerlukan telaah sendiri oleh santri, dengan memperdalam *nabwu shorof* bukan juga untuk menghentikan keberlangsungan belajar sepanjang masa. Tingkatan-tingkatan kitab dimaksudkan sebagai klasifikasi berdasarkan tingkat keluasan dan kedalaman pembahasan serta penjelasan terhadap sebuah materi ilmu tertentu. Seorang santri yang telah menamatkan pembacaan sebuah kitab fiqih kecil misalnya itu berarti ia telah mempelajari materi fiqih secara keseluruhan dari A sampai Z.

Apabila ia menghendaki untuk melanjutkan pembacaannya pada sebuah kitab yang lebih tinggi tingkatannya, kitab-kitab sedang (*mutawâsithât*), maka hal itu berarti ia mengulangi lagi pelajaran materi fiqih dari A sampai Z akan tetapi dengan tambahan lebih detil, lebih dalam serta lebih luas penjelasan-penjelasan yang ditentukan bila dibandingkan dengan kitab sebelumnya. Demikian seterusnya seandainya ia juga bermaksud mengkaji kitab-kitab tertentu yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Hal ini memang di satu sisi menerapkan asas ketuntasan dalam pembelajaran yang berulang-ulang dari tingkat ke tingkat tanpa terlihat kesudahananya. Persoalan yang dipelajari para santri seringkali merupakan pembahasan serupa yang diulang-ulang oleh berbagai buku teks.

Kemampuan santri menjadi penentu keberhasilan suatu santri, bukan ditentukan oleh jenjang-jenjang kelulusan kelasnya, kelulusannya bukan ditentukan ujian dari Kyainya, akan tetapi bagaimana kemampuan santri dalam menerima dan mendapatkan pendidikan, pengajian dan kegiatan rutin pembelajaran menjadi cambuk bagi santri untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak merasa rugi akibat kelalaiannya dalam belajar, tidak ada kewajiban bagi santri untuk mengaji atau tidak tapi dibangun atas dasar kesadarannya bahwa mengaji itu wajib.

Di samping masa belajar para santri yang tidak sama karena berdasarkan kepada kemampuan individu santri serta kurikulum pelajaran yang demikian

lentur (*fleksibel*), kegiatan pendidikan lainnya di pesantren adalah semua materi pembelajaran yang diberikan kepada para santri.

Kyai bertanggung jawab dalam semua totalitas pembelajaran, aktivitas dan kegiatan santri dari bangun tidur sampai hendak tidur menjadi tanggung jawab Kyai, pesantren telah memberikan andil dalam membangun moral, dan menjadi garda terdepan sebagai benteng moral, kegagalan pendidikan umum memberikan alternative bahwa pesantren sangat dibutuhkan dalam menopang moral generasi yang saat ini sudah mulai terdegradasi. Memberikan keterampilan yang mempersiapkan santri untuk handal dalam kehidupannya, pesantren menjadi sarana yang mendukung pendidikan keterampilan.

Pesantren hadir sebagai solusi yang sering dilupakan, perjalanan panjang pesantren yang telah menopang moral generasi, menjadi generasi yang terjaga kebaikan, dan selalu menanamkan kebaikan dalam pribadi santri, penghormatan kepada orang tua yang sering diajarkan dalam pesantren, telah terngiang untuk selalu belajar kebaikan dan menghormati sesama manusia, pendidikan pesantren yang sangat baik ini, semestinya bukan sebagai pendidikan alternative tapi seharusnya menjadi pilihan utama dalam mencetak kader-kader yang berakhlak mulai, pendidikan yang sarat dengan penempatan diri melalui pembelajaran ibadah dan shalat lima waktu yang harus dijalankan selama 24 jam, penanaman nilai-nilai agama yang secara kontinu dan pembekalan mental yang dilakukan setiap waktu, memberikan pendidikan sepanjang hidup yang selalu berprinsip bahwa hidup itu adalah belajar, sementara belajar adalah ibadah.

Menurut kebiasaan di pesantren, pengetahuan seseorang diukur oleh banyaknya buku-buku yang telah dipelajari serta kepada kiai mana seorang santri berguru. Jumlah kitab dalam tulisan Arab *gundul* yang dikarang ulama telah ditentukan oleh institusi pesantren masing-masing. Para kiai juga biasanya mengembangkan diri untuk memiliki keahlian pada cabang pengetahuan tertentu. Kemashuran Kyai dan jumlah kitab yang diajarkannya memberikan mutu santri yang mendapatkan bekal tersebut.

Pesantren memberikan ijazah kepada santrinya sebagai bentuk kepercayaan Kyai kepada santrinya yang telah menamatkan pendidikan ngaji kitab, sehingga santri berhak untuk menyebarkan pengetahuan itu kepada orang lain, ijazah disini bukan ijazah pada sekolah formal, tapi sanad keilmuan yang diberikan kepada santri dari guru ke guru sampai kepada nabi Muhammad saw,

sehingga santri merasakan bahwa apa yang disampaikan gurunya terasa dari nabi Muhammad saw.

Pemberian ijazah ini hanya untuk para santri tingkat tinggi yang telah menyelesaikan kitab-kitab besar dan populer tertentu. Hubungan antara ustadz-santri sedemikian rupa sehingga anjuran-anjuran yang diberikan oleh sang kiai dianggap oleh santri sebagai perintah yang mengerjakan dan karenanya pasti akan berhasil.

Pengajaran pesantren bukan hanya terlihat secara dahir akan tetapi memberikan kekuatan secara batin, bahkan memberikan jalan bagi hubungan Kyai-santri sepanjang masa, artinya bahwa hubungan Kyai-santri bukan hanya terjadi pada saat santri mendapatkan pendidikan di pesantren tapi juga terbangun hubungan Kyai dan santrinya setelah keluar sebagai alumni, terbangun kekerabatan yang sangat kental, dan ini berlangsung sepanjang hidup, bahkan setelah kematian menjemputnya, hal ini biasanya banyak santri yang mengirimkan hadiah fatehah kepada Kyainya setelah meninggal dunia.

Pola pendidikan yang menganut sistem pembelajaran tradisional dengan menggunakan sistem *halâqah* ini, mendapat kritikan cukup tajam dengan menyatakan bahwa sistem *halâqah* hanya dapat menghasilkan 1 persen murid yang pandai, sedangkan 99 persen lainnya hanya belajar bagaimana dapat bersama-sama membeli minyak dengan harga yang murah (Yunus, 1995:58).

Kritik ini dinilai oleh Karel A. Steenbrink sedikit berlebihan karena hanya memperhatikan kecerdasan saja. Menurutny, untuk pengajaran agama, pesantren memang tidak memberikan hasil sebaik melalui pendidikan formal, namun pengaruh agamis yang dihasilkan pesantren justru yang lebih penting daripada pengajaran formal (Karel, 1984:17). Meskipun demikian, kritik tersebut mencerminkan pandangan kaum pembaharu yang telah mengenyam pendidikan modern, bahwa sistem pendidikan pesantren mesti diperbaharui agar tetap kontekstual dengan perubahan dan perkembangan zaman.

BAGIAN KEDELAPAN

SISTEM PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH



A. Latar Historis Pesantren

Diskusi dan kajian dalam bab ini menyajikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat, sebagai studi kasus kajian tentang integrasi keilmuan pada pesantren modern. Sebagai sebuah pesantren modern, Husnul Khotimah telah memasukkan unsur-unsur kemodernan dalam sistem pendidikannya. Pesantren ini sepenuhnya menerapkan sistem *madrasi* (sistem sekolah modern) untuk aktivitas pembelajaran para santri yang menggabungkan materi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam kurikulum pendidikan formal, terstruktur, dan berjenjang. Selain itu manajemen pesantren telah sepenuhnya mengadopsi sistem manajemen modern dengan struktur hirarkis yang jelas. Pergantian kepemimpinan pesantren dilakukan berdasarkan sistem yang telah dibangun, tidak berdasar geneologis sebagaimana lazimnya pesantren.

Kajian tentang pesantren Husnul Khotimah diawali dengan mengungkap latar belakang sejarah didirikannya pesantren yang memadukan sekolah dan pesantren. Setting sosial dan budaya dikemukakan sebagai faktor yang mempengaruhi munculnya integrasi pesantren dan sekolah. Kajian diikuti dengan karakteristik pendidikan pesantren yang menggabungkan pendidikan formal (MTs dan MA) dengan pendidikan pesantren. Pesantren modern dengan sistem *madrasi*-nya pada akhirnya melahirkan lulusan yang berbeda karakternya dengan lulusan pesantren salaf. Kajian tentang implikasi integrasi terhadap jaringan pesantren menjadi penutup dari bab ini.

Terletak di sebuah area seluas kurang lebih 10 hektar di pinggiran kota Kuningan, di sebuah desa di tepi jalan raya utama yang menghubungkan Kuningan-Cirebon-Jakarta, Pondok Pesantren Husnul Khotimah (PPHK) telah menyedot perhatian masyarakat sejak dibukanya pada tahun pelajaran 1994/1995. *Pertama*, peningkatan jumlah santri yang sangat cepat diikuti dengan penambahan bangunan fisik pesantren yang demikian lengkap dan modern. *Kedua*, pesantren

ini mampu membuat kejutan dengan banyak mendapat penghargaan dalam ajang perlombaan di bidang akademik, olahraga, maupun seni di samping menghasilkan lulusan yang dapat menembus bangku PTN di dalam negeri serta berbagai perguruan tinggi di luar negeri. *Ketiga*, pesantren kerap dikunjungi para tokoh lokal maupun nasional dalam berbagai momen kegiatan.

PPHK terletak di Desa Manis Kidul, kecamatan Jalaksana, kabupaten Kuningan. Jarak PPHK dengan kota Kuningan sekitar 10 kilometer ke arah selatan. Adapun dengan kota Cirebon sekitar 27 kilometer ke arah utara (pantura). Pesantren ini didirikan oleh H. Sahal Suhana, SH. dengan dukungan beberapa tokoh dan kenalan dekatnya. Kebanyakan dari mereka adalah alumni Timur Tengah, antara lain Hidayat Nurwahid, Achidin Noor, serta Ade Syabul Huda. Latar belakang pendidikan Timur Tengah ditambah semangat independensi masing-masing menjadi dorongan kuat untuk tidak mengikatkan diri kepada ormas-ormas mapan di Indonesia.

Kelahiran Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan, Jawa Barat, merupakan gejala baru di wilayah eks-karesidenan Cirebon. Meskipun tidak menjadi pesantren modern yang paling awal berdiri, namun perkembangannya yang demikian pesat hingga dapat menjaring para santri dari berbagai daerah di Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri. Karena perkembangan yang demikian amat pesat dan singkat, hanya dalam satu dasawarsa, kerap kali pesantren ini dituduh sebagai pusat penyebaran paham dan ajaran Wahabi, bahkan sering diasosiasikan dengan gerakan fundamentalisme. Oleh KH. Ade Syabul Huda, Lc., pimpinan pesantren masa awal dan kini menjadi ketua umum yayasan Husnul Khotimah Kuningan, tantangan awal pendirian pesantren antara lain berupa gangguan yang luar biasa, *min al-jinnat wa al-nâs*, tantangan dari golongan jin dan manusia.

Pesantren Husnul Khotimah berdiri berkat sumbangan seorang dermawan bernama H. Sahal Suhana, SH. Pada tahun 1994. Program pendidikan formal secara resmi dibuka tahun 1994, yaitu Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Husnul Khotimah merupakan pesantren modern ditandai dengan keharusan bagi para santrinya untuk menguasai bahasa Inggris dan Arab dengan baik. Pimpinan (pengasuh) –atau menurut istilah resmi mereka disebut *mudîr* pesantren sejak berdiri hingga sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian. Periode tahun 1994 sampai Agustus 1996 diasuh oleh KH. Ade Syabul Huda, Lc. Kemudian kepemimpinan diteruskan oleh KH. Achidin Noor, MA hingga tahun

2006. Sejak tahun 2006 hingga sekarang *mudir* pesantren dijabat oleh KH. Sufyan Nur, Lc.

Berada di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk, jauh dari kebisingan, di bawah kaki gunung Ciremai, di atas lahan seluas 10 hektar lebih, Pondok Pesantren Husnul Khotimah didirikan. Persisnya, terletak di Desa Maniskidul, kecamatan Jalaksana, kabupaten Kuningan, bersebelahan dengan desa Manislor yang berada di sebelah utaranya.

Lahan yang ditempati pesantren, semula merupakan tanah pekarangan yang ditumbuhi pepohonan yang menyerupai hutan belantara. Meski keberadaan pesantren berlokasi agak masuk ke dalam, namun mudah dijangkau mengingat ia berada dalam jalur jalan utama yang menghubungkan Kuningan dan Cirebon serta ke jalur pantura, menuju Jakarta, Bandung, atau Jawa Tengah.

Ide pendirian pesantren ini bermula dari keinginan H. Sahal Suhana SHtokoh asli Kuningan yang menjadi pegawai Pemda DKI pada Dinas Tata Kota dan beristrikan penduduk Maniskidul, untuk mendirikan sebuah pesantren besar. Meski H. Sahal Suhana sendiri tidak memiliki latar belakang pendidikan pesantren, namun keinginannya untuk mendirikan pesantren begitu tinggi, cita-citanya yang sedari kecil ingin menjadi kiai tidak kesampaian karena saat itu orang tuanya menyarankan untuk masuk SMP ketimbang ke pesantren, masih tertanam kuat dalam batinnya. Semula ia berniat membangun pesantren di Garawangi, desa tempat kelahirannya, tetapi orang tua Sahal tidak menyetujuinya. Menurut pendapatnya, bila pesantren dibangun di Garawangi maka tidak ada masalah, tetapi jika didirikan di Maniskidul ada tantangan, yakni Ahmadiyah di desa sebelahnya, Manislor.

Berbekal saran orang tua serta keprihatinannya yang mendalam terhadap perkembangan Jama'ah Ahmadiyah di Desa Manislor, yang telah mencapai jumlah yang amat signifikan, sekitar 75 % dari jumlah seluruh penduduk desa yang berjumlah sekitar 4000 orang. Keprihatinan yang sama dirasakan pula oleh tokoh-tokoh penduduk setempat. Dari berbagai perbincangan dan diskusi, antara lain dengan HM. Djunaedi yang menjadi ketua MUI desa Maniskidul, usaha untuk mencegah agar Ahmadiyah tidak berkembang merambah ke desanya semakin memperteguh Sahal untuk membangun pesantren di Maniskidul.

Pendirian Husnul Khotimah dimulai dengan studi banding ke beberapa pesantren besar di Cirebon sambil melakukan pencarian lahan untuk pesantren. Tanah seluas 4.200 meter persegi pertama kali diperoleh dari wakaf H. Ibrahim

Sukanta mertua Sahal. Kemudian ia sendiri menambah dengan melakukan pembebasan tanah di dusun Kliwon, Maniskidul. Di antara para tokoh pesantren yang dijadikan Sahal sebagai tempat berkonsultasi adalah kiai sepeuh pesantren Buntet Cirebon, KH. Fuad Hasyim dan KH. Abdullah Abbas kini keduanya telah meninggal dunia. Atas saran kiai sepeuh ini, Sahal berziarah ke tanah suci Mekah pada tahun 1993 sebelum mendirikan pesantren. Sekembalinya dari Mekah, atas saran kiai sepeuh ini pula Sahal membangun Masjid pada 1993, sebagai prasyarat berdirinya sebuah pesantren. Setelah itu di areal yang sama dibangun madrasah dan asrama tempat untuk menginap para santri kelak. Meski pembangunan fisik pesantren hampir rampung, namun Sahal belum menemukan konsep pesantren ideal yang menjadi obsesinya, yakni pesantren yang nanti berdiri dikelola seperti Gontor.

Secara tidak sengaja, pada tahun 1993 H. Sahal mengunjungi keponakannya di Palembang dan ia sempat melihat-lihat Pondok Pesantren Assalam. Karena merasa tertarik, maka ia pun menemui Abdul Malik Musir Lc., pimpinan pesantren Assalam keluaran Gontor yang melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Dari pertemuan dengan Abdul Malik ini selanjutnya mengantarkan H. Sahal untuk bertemu dengan Hidayat Nurwahid (kini ketua MPR) yang kala itu menjabat ketua Yayasan Haramain Jakarta

Dari hasil diskusi yang dilakukan secara *intens*, dihasilkan beberapa kesepakatan, antara lain untuk berbagi tugas. H. Sahal beserta keluarganya menyiapkan *hard ware* (tanah, bangunan, dan sejenisnya) sementara tim yang dipimpin Hidayat Nurwahid menyiapkan *soft ware* (konsep) pesantren yang menggabungkan berbagai keunggulan pesantren di Indonesia. Pondok Pesantren Husnul Khotimah kemudian ditetapkan sebagai *pilot project* pertama pembangunan pesantren yang dikembangkan yayasan Haramain ini.

Sebagai tindak lanjut dari konsep tersebut, pada tanggal 2 Mei 1994, dibentuk yayasan Husnul Khotimah –dengan H. Sahal Suhana sebagai ketua umumnya-- untuk menaungi pesantren yang akan didirikan itu. Pesantren yang didirikan untuk menata manajemen kelembagaannya, tidak bertumpu pada perseorangan, tetapi dikelola secara kolektif. Pilihan ini ditetapkan dalam rangka melindungi pesantren dari ketergantungan pada figur tunggal kiai. Maka kepemimpinan di pesantren menggunakan manajemen struktural.

Dalam tahun pelajaran 1994/1995 ini, pesantren mulai membuka dan menerima santri baru. Pada awalnya para santri berasal dari masyarakat sekitar pesantren dengan biaya gratis. Sebagai pimpinan pesantren, ditunjuk KH. Ade

Syabul Huda, Lc., yang merupakan lulusan al-Azhar Mesir. Sebelum ke Mesir, ia menempuh pendidikan di pondok Gontor serta LIPIA Jakarta. Setelah berjalan beberapa bulan barulah pesantren itu diresmikan pembukaannya oleh Bupati Kuningan pada 7 Januari 1995.

Pendirian pesantren Husnul dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari peran penting H. Sahal Suhana, SH. Dalam konteks ini, keinginan H. Sahal untuk mendirikan pesantren di kampung halaman, dapat dilihat dari perspektif tradisi dan budaya masyarakat Kuningan (etnis sunda). Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru, khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, telah merubah kondisi sosial masyarakat Kuningan. Dengan semakin mudahnya transportasi darat menuju kota-kota besar, arus urbanisasi sedemikian pesat menyedot masyarakat ini untuk pergi merantau ke Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain. Para perantau yang pergi ke Jakarta tersegmentasi dalam berbagai lapisan masyarakat. Untuk masyarakat kecil, mata pencaharian mereka umumnya sebagai pedagang bubur kacang, mie rebus, serta jamu tradisional. Sedangkan untuk kelas menengah ke atas, mereka tersebar ke berbagai sektor bisnis dan pemerintahan. Tidak jarang karena keberhasilan ekonomi yang diraihinya, mereka kemudian menetap dan memiliki rumah di Jakarta. Akan tetapi, mudik ke kampung halaman merupakan tradisi yang tidak hilang. Mobilitas para perantau yang mudik terlihat dengan jelas ketika menjelang dan selama Idul Fitri dengan berbagai atribut, identitas, dan kendaraan yang mereka tumpangi, menggambarkan kelas sosial mereka.

Para perantau yang telah berhasil ini, dengan berbagai latar belakang dan motivasi, membangun berbagai sarana dan prasarana publik di daerah asalnya, Kuningan. Di daerah ini dengan mudah ditemukan beberapa hotel mewah, rumah makan, sarana rekreasi, agrobisnis, serta sarana pendidikan. Selain itu, masyarakat kelas menengah ini, meski berada di tengah kota besar namun mereka masih tetap melestarikan tradisinya. Dalam pergaulan dengan sesama orang Kuningan, misalnya mereka tetap mempergunakan bahasa Sunda sebagai alat komunikasinya. Untuk pendidikan anak-anaknya, mereka tetap mempertahankan pentingnya anak-anak mereka bisa mengaji Al-Qur'an, shalat dengan benar, serta bertutur kata yang baik. Tetapi pada sisi lain, mereka dihadapkan pada kenyataan semakin pentingnya penguasaan ilmu-ilmu modern (sains). Karena itu mereka memilih lembaga pendidikan yang dapat memenuhi dua keinginan tersebut. Dalam konteks inilah sesungguhnya pendirian pesantren Husnul Khotimah menemukan relevansinya.

Tujuan utama pendirian pesantren itu sendiri adalah sebagai upaya untuk tampil menjadi lembaga pengkaderan generasi muda muslim *rabbani* yang dapat menegakkan panji-panji Islam di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, lulusan pesantren diharapkan menjadi santri yang berakidah dan beribadah secara benar, berakhlaq mulia dan berguna bagi masyarakatnya.

Seiring dengan bertambahnya waktu, perkembangan pesantren dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dari jumlah hanya puluhan santri saja, sekarang telah mencapai jumlah ribuan, sekitar 1800-an orang santri. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, baik dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, maupun dari Papua. Bahkan, pernah menerima santri yang berasal dari Malaysia. Pertumbuhan jumlah santri yang demikian amat cepat dan luas ini terutama ditentukan oleh jaringan yang dimiliki mereka.

Mencermati animo kaum muslimin yang sangat besar di Indonesia khususnya terhadap kebutuhan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu mencetak Generasi Muda muslim yang senantiasa berorientasi kepada Allah sebagai *Rabb* dan *Ilâh* dalam setiap langkahnya, dan juga mampu bersaing di era milenium ke-3, kehadiran pesantren oleh para pendiri dan perumusnyanya dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan ummat tersebut dengan pola tarbiyah Islamiyah, salafiyah, sistematis dan terpadu.

Dalam konteks seperti ini, pesantren Husnul Khotimah dapat dikatakan sebagai pesantren independen dengan ideologi salafi. Dalam konteks yang lebih luas pilihan artikulatif kelompok salafi, terutama berkaitan dengan ideologi keagamaan, tidak seragam. Sebagian mereka merasa dekat secara ideologis dengan Muhammadiyah dan mengembangkan ideologi reformis secara berkelanjutan. Sebagian yang lain berusaha untuk kembali kepada khazanah Islam yang dianggap juga mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kemoderenan. Mereka mengambil ideologi salafi sebagai pilihan dan menerapkannya secara ketat dan kaku. Keduanya sebenarnya dapat dikatakan sama-sama berada dalam garis salafi. Akan tetapi, mengutip Azyumardi Azra, spektrum wacana dan gerakan salafi sangat luas yang mencakup salafi klasik, *neo salafi* atau salafi damai dan salafi radikal. Menurut identifikasi ini, Wahabiyah dapat dikategorikan sebagai salafi klasik dan salafi radikal sekaligus. Sedangkan neo-salafi merupakan sebuah kategori yang sangat kompleks. Istilah *neo* merujuk kepada periode modern yang

ditandai dengan perjumpaan budaya masyarakat muslim dengan kekuatan kolonial

Dilihat dari perspektif sejarah pesantren, keberadaan pesantren independen sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pondok Pesantren Darussalam, Gontor Ponorogo, Jawa Timur, didirikan pada tahun 1926, merupakan sebuah contoh sekaligus salah satu akar tumbuhnya pesantren-pesantren independen. Ciri utama pesantren modern adalah sifat independensinya terhadap organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Pesantren modern berusaha tidak terlibat dalam perdebatan tentang madzhab-madzhab dalam Islam yang seringkali mewarnai relasi antarorganisasi Islam waktu itu.

Dengan demikian, Pondok Pesantren Husnul Khotimah (PPHK) ini dilihat dari perspektif sejarah pesantren merupakan pesantren independen yang akarnya dapat dilihat dari kemunculan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan pada tahun 1926. Oleh karenanya PPHK termasuk jenis pesantren modern bila dikaitkan dengan ciri-ciri utamanya. Ciri utama pondok pesantren modern sifat independensinya terhadap organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan sejenisnya. Pesantren modern berusaha tidak terlibat dalam perdebatan tentang madzhab-madzhab dalam Islam yang seringkali mewarnai identitas dan ideologi organisasi itu. Ciri berikutnya adalah penekanan pada penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Ciri penting lainnya adalah materi kajian keagamaan tidak menjadikan kitab kuning sebagai buku teks, tetapi mempergunakan buku-buku teks keIslaman yang ditulis pada masa modern.

B. Sistem *Madras*: Model Pendidikan Integral

Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan, sejak awal memang dirancang menjadi lembaga pendidikan Islam modern dalam bentuk pesantren. Dengan menggabungkan pendidikan formal dan pendidikan pesantren dalam satu institusi, pesantren ini ingin mewujudkan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam modern dengan menerapkan tiga program utamanya, yaitu transformasi ilmu pengetahuan dan bahasa, penanaman nilai-nilai Islam dan akhlakulkarimah, serta program dakwah kepada masyarakat menuju kehidupan yang diridhai Allah Swt. Dengan demikian, pesantren dapat menghasilkan para kader tangguh di era globalisasi. Untuk memenuhi maksud ini, pesantren menggandeng beberapa orang tenaga pengajar yang merupakan alumni Universitas di Timur Tengah,

LIPIA Jakarta, IPB, ITB, UI, Unpad dan universitas-universitas terkemuka lainnya. Rekrutmen tenaga pengajar dilakukan dengan memanfaatkan jaringan dakwah yang mereka miliki.

Lulusan Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini ditargetkan memiliki bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar (*itqon*), hafal minimal 5 juz al-Qur'an (bagi santri lulusan MTs Husnul Khotimah) dan 4 juz (untuk santri ukan lulusan MTs Husnul) dengan lancar, mahir berbahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar, serta memiliki semangat keislaman (*ghirah* Islamiyah) yang tinggi. Pada akhirnya, lulusan pesantren ini diharapkan menjadi sosok generasi muslim yang beraqidah lurus, beribadah yang benar, berakhlak mulia, berilmu dan berwawasan luas, berbadan sehat dan kuat, sanggup berusaha, terampil dan mandiri, sanggup mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengatur waktu dengan efisien, teratur dan rapi dalam segala urusannya, bermanfaat bagi masyarakat (menjadi da'i yang produktif).

Tujuan di atas dilatar belakangi oleh kemajuan zaman yang demikian cepat sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan terjadinya dekadensi moral di kalangan sebagian besar generasi muda. Menghadapi persaingan global, generasi muda Islam dituntut menguasai ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum secara seimbang. Kematangan imtaq dan iptek merupakan syarat mutlak memenangkan persaingan di segala bidang. Menjawab kebutuhan di atas, PPHK berusaha mengembangkan lembaga pendidikan Islam alternatif untuk membangun generasi *Rabbani* sesuai harapan umat.

Untuk mencapai tujuan itu, pesantren membuka lembaga pendidikan formal, Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 1994 dan Madrasah Aliyah (MA) setahun kemudian, pada tahun 1995. Madrasah-madrasah ini sepenuhnya mengikuti kurikulum Departemen Agama yang dipadukan dengan kurikulum keagamaan pesantren. Para siswanya juga memperoleh ijazah yang sama dengan mereka yang bersekolah di madrasah-madrasah negeri. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa dari segi kurikulum madrasah, pimpinan pesantren menyeleksi mata-mata pelajaran umum yang dianggap penting dan membuang mata pelajaran yang dianggap kurang penting. Pertimbangan untuk memasukan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pesantren terutama karena pertimbangan Ujian Akhir Nasional (UAN). Ini dilakukan sebagai upaya

memasukan mata pelajaran keagamaan khas pesantren ke dalam madrasah sehingga beban kurikulum tidak bongor.

Dengan demikian, pesantren Husnul Khotimah mengintroduksi apa yang mereka sebut dengan kurikulum integral. Di dalam kurikulum integral tidak terdapat perbedaan ilmu-ilmu umum dan agama dalam aktivitas pembelajarannya. Tidak hanya itu, seluruh unsur pendidikan–lembaga maupun kegiatan-kegiatan diletakkan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang tujuan pesantren. Dengan melakukan hal ini, meskipun secara formal di madrasah siswa mendapat pelajaran sesuai dengan kurikulum Depag dan kurikulum pesantren, di mana pengetahuan umum dan agama mendapat porsi besar, secara informal di dalam lingkungan pesantren mereka mendapatkan tambahan pelajaran keagamaan Islam yang sejalan dengan obsesi pesantren.

Ciri khas pendidikan pesantren ini adalah pelaksanaan kurikulum terpadu, materi yang diajarkan merupakan integrasi kurikulum Departemen Agama (MTs dan MA) dengan kurikulum pesantren. Program studi yang ditawarkan pada MA meliputi program studi: Keagamaan (Ilmu Agama Islam), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program tambahan di dalam lingkungan pesantren yang dikembangkan antara lain diarahkan untuk penanaman nilai-nilai Islam dan program dakwah. Selain kegiatan itu, pesantren juga memberi kesempatan kepada para santri untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, antara lain kepanduan, bela diri, PMR, kaligrafi, drumband, dan berbagai cabang olahraga.

Bentuk kegiatan kepesantrenan dilakukan dengan memberikan pengajaran yang di dalam madrasah dengan memodifikasi buku-buku teks kurikulum Depag dengan buku teks pesantren. Untuk materi keagamaan pembelajaran diberikan dengan merujuk pada penggunaan kitab-kitab modern juga kitab kuning, misalnya kitab: *Bulūgh al-Marâm*, *Riyâdl al-Shâlihîn*, *Alfiyah*, *Tsaqafah Islamiyah*, *Taqrîb*, *Hayât al-Shahâbah*, *Kifâyat al-Akhyâr*, *al-‘Arabîyyat li al-Nâsî’în*, dan sejenisnya. Pemaduan kurikulum untuk mata pelajaran keagamaan dilakukan dengan tetap memperhatikan topik-topik yang telah ditentukan dalam kurikulum Depag, tetapi untuk implementasinya dalam pembelajaran, buku teks yang dipakai adalah merujuk dan menggunakan kitab-kitab di atas.

Memperhatikan sistem pendidikan yang dikembangkan pesantren ini, dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan pesantren menerapkan sistem *madrasî*, yakni mata pelajaran ilmu-ilmu keagamaan khas milik pesantren diajarkan di

dalam madrasah bersama-sama dengan mata pelajaran pendidikan formal. Seluruh kegiatan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan kepesantrenan diformulasikan dalam satu kesatuan pendidikan yang dilakukan di dalam madrasah. Dengan menerapkan sistem ini, aktivitas para santri tidak dapat membedakan antara pembelajaran yang merupakan pelaksanaan kurikulum Depag dan kurikulum pesantren, karena keduanya telah sama-sama diformalisasikan dalam bentuk madrasah. Meski demikian, secara keseluruhan porsi yang besar tetap diberikan untuk pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dengan perbandingan 60:40.

Keberadaan PPHK sendiri menarik minat banyak kalangan Muslim perkotaan, terutama kalangan ekonomi menengah untuk bergabung. Pesantren Husnul Khotimah menetapkan biaya yang mahal untuk ukuran penduduk sekitar pesantren. Dengan kurikulum integral pesantren ini menjadi favorit tidak hanya bagi masyarakat Cirebon, tapi hampir kota-kota besar di Indonesia mengirmkan putra-putrinya ke pesantren ini. Dengan uang awal masuk pesantren sebesar 6 juta rupiah lebih, dan iuran bulanan sebesar 400 ribu rupiah per bulan, pesantren ini masuk dalam daftar pesantren papan atas di Cirebon. Sudah dapat diduga bahwa hanya anak-anak masyarakat kelas menengah Muslim yang dapat menyekolahkan anaknya di pesantren ini.

Maka tidak mengherankan model integrasi keilmuan di pesantren Husnul ini dengan memadukan elemen keislaman, kepesantrenan, dan kemodernan mengambil bentuk sistem *madrasi* yang diartikulasikan secara modern, dalam takaran tertentu merupakan perwujudan dari upaya memenuhi relevansi dengan masyarakatnya. Aktivitas pembelajaran yang didesain dengan mengadopsi sepenuhnya sistem pendidikan modern, model pemahaman keagamaan yang diartikulasikan melalui kajian kitab-kitab modern, serta penataan dan pemenuhan sarana dan prasarana pesantren, memang sangat cocok untuk masyarakat menengah perkotaan yang mulai gandrung akan religiusitas.

Berbeda dengan pesantren salaf, kepemimpinan di Pesantren Husnul Khotimah sendiri menganut sistem kepemimpinan modern. Dalam kalangan pesantren salaf, biasa disebut sebagai kiai pengasuh, dalam pesantren ini mereka menyebutnya sebagai mudir. Manajemen yang dipakai pesantren merupakan implementasi dari sistem manajemen modern. Mudir yang merupakan pimpinan tertinggi pesantren membawahi divisi MA, MTs, pesantren putra, serta pesantren putri. Untuk tugas-tugas teknis administratif, mudir dibantu oleh seorang

sekretaris dengan memiliki beberapa staf sekretariat. Roda pesantren sepenuhnya berada di bawah pengendalian sistem manajemen modern ini.

PPHK menyadari peran penting media massa sebagai media komunikasi dengan dunia luar pesantren, terutama dengan orang tua para santri. PPHK menerbitkan majalah bulanan *Suara Husnul Khotimah*. PPHK juga membuka website dengan inisial www.husnul.com. Bahkan untuk informasi perkembangan akademik serta pembayaran keuangan para santri, orang tua dapat mengaksesnya melalui SMS. Media ini akan memberi balasan berupa SMS terhadap permintaan informasi orang tua. Penggunaan media massa, cetak dan elektronik, menunjukkan bahwa PPHK memahami arti penting komunikasi, tidak hanya untuk memperkuat jaringan, tetapi juga untuk menjelaskan kepada publik tentang diri dan aktivitasnya.

PPHK mengambil bentuk arsitektur tertutup dalam satu kompleks pesantren, yang memisahkannya dari lingkungan komunitas sekitar pesantren. Bangunan utama sebuah pesantren, bangunan madrasah, masjid yang luas, dan asrama santri serta para ustadz dan kiai dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung, misalnya lapangan olahraga, kantin, ruang klinik kesehatan, aula, serta halaman yang luas dan asri sebagai tempat duduk dan istirahat para santri sewaktu bertemu dengan keluarga yang mengunjunginya.

DAFTAR PUSTAKA



- Abasri. (2007). *Sejarah dan Dinamika Lemabag-lemabaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Meunasab, Pesantren, dan Madrasah*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdullah, Amin (2007). *Desain Pengembangan Akademik LAIN Menuju UIN: Dari Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Integratif-Interkonektif*. *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: Suka Press.
- Abdullah, Amin. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zarnuji, (-). *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*. Semarang: Toha Putra
- Arbery, AJ. (-). *Revelation and Reason in Islam*. London: Allen and Unwin.
- Arifin, Zaenal. (2012). Perkembangan Pesantren di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 9(1). 40-53.
- Arwildayanto.dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan. Kajian Teoretis, Aplikatif dan Eksploratif*. Bandung: Cendikia Press.
- Azra, Azyumardi (2005). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*. Jakarta : Logos.
- Azra, Azyumardi. (2003). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos.
- Bruinessen, Martin van. (1991). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bruinessen, Martin van. (1997). *Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci Orang Nusantara Naik Haji, dalam Dick Douwes dan Nico Kapten, Indonesia dan Haji*. Jakarta: INIS.
- Burhanudin, J & Afrianty, Dina (2006). *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daud, Mohd Nor. (2003). *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam*. Bandung : Mizan.

- De Graaf H.J. & Th. Pigeaud (2003). *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: Grafiti Press.
- Depag. (1999). *Laporan Penelitian, Peran Pesantren dalam Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Balitbang Depag RI.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Diding, N & Sibaweh, I. (2017). *Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elzatrow, Ngatawi. (2006). Dialog Pesantren-Barat: Sebuah Transformasi Dunia Pesantren. *Jurnal Pondok Pesantren Mibrab*. Volume 4 (1).3-11.
- Engkoswara & Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fakhry, Majid. (1983). *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press.
- Fauzan (2005). *Menimbang Sisi Positif Perlunya Pembaruan Pendidikan Islam* Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* Jakarta: Prenada Media.
- Geertz, Clifford (1976). *The Religion of Java*. Chicago: Chicago University Press.
- Geertz, Clifford. (1960). The Javanese Kijaji: The Changing Role of Cultural Broker, *Comparative Studies in Society and History*, vol 2. 228-249.
- Gholsani, Mehdi. (1986). *Kelemahan Sains Modern. Filsafat Sains menurut al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Gholshani, Mehdi. (2004). *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami atas Sains*. Bandung: Mizan.
- Grimmit, Michael. (1997). *What Can I Do in Religious Education*. Great Britain: Mayhew-McCrimmon.
- Haedari, Amin. (2006). *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*. Jakarta: LeKDIs dan Media Nusantara.
- Hanif, Abdullah. (2006). Arus Islam Melayu. Dimanakah Peranan Pesantren. *Jurnal Pondok Pesantren Mibrab*. Volume 4 (1).25-31.
- Hidayani, M. (2018). Model Pengembangan Kurikulum. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 16(2), 375-394.

- Hoy, Wayne & Miskel, Ccecil. (2008). *Educational Administration. Theory, Research, and Practice*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hurgronje, C. Snouck. (1991). *Travel Notes in West and Central Java 1889-1891*. Leiden: Leiden University Library.
- Husain, Syed Sajjad & Ashraf Syed Ali. (1993). *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Irianto, Yoyon. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan. Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail, Raji. (1982). *Islamiization of Knowledge: General Principles and Workplan*. Washington: IIIT.
- Junaedi, Mahfud. (2008). Mewujudkan Pondok Pesantren Inovatif-Integratif-Futuristik. *Mibrab, Jurnal Pesantren*. 2(4). 20-45.
- Jung, Carl. (2017). *Psikologi dan Agama. Uraian Psikologi Perihal Dogma dan Simbol*. Yogyakarta: Ircisod.
- Kafrawi. (1978). *Pembaharuan Sistem Pondok Pesantren sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Cemara Indah.
- Karel A, Steenbrink. (1984) *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Karel, Steenbrink. (1994). *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Kartanegara, Mulyadhi. (2005). *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Arasy Mizan.
- Kuntowijoyo. (2005). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Bandung: Teraju.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Mahzar, Armahedi. (2004). *Revolusi Integralisme Islam*, Bandung: Mizan.
- Makdisi, George. (1990). *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Maksum. (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos.
- Manfred, Ziemek (1986). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Mas'ud, Abdurrahman. (1997). *The Pesantren Architect and Their Sosio-religious Teaching (1850-1950)*. Ph.D Dissertation. Los Angeles: University of California Los Angeles.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS 1994.

- Mastuhu. (2001). Pendidikan Islam di Indonesia Masih Berkutat pada Nalar Islami Klasik. Menuju Pendidikan Islam Pluralis. *Jurnal Tashwirul Afkar*. No. 11 h. 77-83
- Mavor, Ian., et. al., (1997). *Religious Education: Its Nature and Aims*. Queensland: Curriculum Branch of the Department of Education.
- Mochtar, Affandi. (2001) *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalimah.
- Mudzhar, M. Atho. (1993). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Muhaimin, AG. (2002). *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujamil Qomar. (2007). *Pesantren: dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadhi, Kartanegara (2003). *Pondasi Metafisik Bangunan Epistemologi Islam: Perspektif Ilmu-Ilmu Filosofis*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Mulyasa, E. (2014). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasution, Harun. (1986). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press.
- Ninian Smart (1968). *Secular Education and the Logic of Religion*. London: Faber and Faber.
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Parekh, Bikhu. (2012). *Rethinking Multiculturalisme Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwakawaja, Soegarda. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Purwanto, Ngalim. (2016). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Rahardjo, Dawam. (1995). *Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan. Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Said Aqil Siroj. (2006). *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan.
- Saridjo, Marwan dkk. (1982). *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Saud, Udin, S & Makmun, Abin. (2009). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Rosdakarya.

- Shofiyah, S. (2018). Prinsip–Prinsip Pengembangan Kurikulum dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 122-130.
- Sibaweh, Imam. (2020). *Manajemen Landasan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama
- Soewardi, Herman (2001). *Mempersiapkan Kelahiran Sains Taubidullah*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Soewardi, Herman. (2001). *Roda Berputar Dunia Bergulir: Kognisi Baru tentang Timbul Tenggelamnya Sivlisasi*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Subhan, Arief. (2008). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas, Disertasi S3 Pada SPS UIN*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Suhardan, Dadang. (2010). *Supervisi Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES
- Suprayogo, Imam (2009) *Kyai dan politik: Membaca citra politik kyai*. UIN-Maliki Press, Malang.
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORLA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403-416.
- Suteja. (2016). *Teori Dasar Tasawuf Islam*. Cirebon: CV. Elsi Pro.
- Syalabi, Ahmad. (1954). *History of Moslem Education*. Beirut: Dar al-Kasysyaf.
- Syalabi, Ahmad. (1982). *Al-Tarbiyat al-Islâmiyyah: Nidzâmuhá, Falsafatubá, Tárikhubá*. Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah.
- Syarif, M. S. M. (2019). Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Pesantren. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, 5(1), 109-131.
- Syed, Naquib. (1981). *Islam and Secularism* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka.
- Taufik, Abdullah. (1996). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Islam*. Jakarta: LP3ES.
- Toha, Mahmud. (2004). *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora*. Bandung: Teraju.
- Untung, Moh.S. (2010). Telaah Historis Pusat Pendidikan Islam di Jawa sampai Periode Perang Jawa. *Forum Tarbiya*. 8(2). 215-228.
- Usman, H. (2009). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wahid, Abdurrahman (1995). *Kata Pengantar dalam Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan
- Wahid, Abdurrahman. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esei-esei Pesantren*. Yogyakarta: LkiS.
- Wahid, Abdurrahman. (1991). *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Yunus, Mahmud (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yunus, Mahmud. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.

BIODATA PENULIS



Saefudin Zuhri dilahirkan di Indramayu pada 02 Maret 1971. Pendidikan dasar ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Kertasemaya Indramayu. Setelah lulus MTs, ia melanjutkan pendidikan di PGAN Cirebon pada 1987-1990. Lalu melanjutkan di IAIN Sunan Gunung Djati di Cirebon, yang diselesaikan pada 1994. Selama studi di PGAN dan IAIN SGD, penulis menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Jagasatru Kota Cirebon, di bawah asuhan Habib Muhammad bin Syeh (biasa dipanggil dengan sebutan Kang Ayip Muh). Melanjutkan studi S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengambil Program Studi *Islamic Studies*. Pada 2009 penulis menuntaskan studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil Konsentrasi pendidikan Islam.

Pengalaman pekerjaan dimulai pada 1998 dengan diangkat menjadi CPNS dosen oleh Kementerian Agama yang ditempatkan di STAIN (sekarang IAIN Syekh Nurjati) Cirebon. Pada 2002-2006 diberi tugas tambahan sebagai sekretaris Pusat Penerbitan dan Pengkajian Ilmiah (P3I). Pada 2006 diberi amanah sebagai kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) hingga 2010. Lalu, pada Maret 2011 diberikan amanah baru sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) hingga awal 2015. Selanjutnya, sejak 2015 hingga sekarang diberi kepercayaan sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Beberapa tulisannya dimuat pada Buku Antologi *Pesantren Masa Depan* (Pustaka Hidayah, Bandung, 1999), dalam jurnal *Lektur*, serta dalam Buku *Antologi Pendidikan Islam*. “Modernisasi Pendidikan Pesantren: Studi atas Pesantren Kempek Cirebon”

(Penelitian), “Integrasi Pesantren dan Sekolah: studi pada Pesantren Kempek dan Husnul Khotimah” (Penelitian). Penulis dapat dihubungi melalui email: saefudinzuhri@syekhnurjati.ac.id

Buku ini mengkaji modernisasi yang dialami pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam asli nusantara. Pesantren tetap *survive*, tak lekang oleh zaman dan tak lapuk oleh keadaan. Pesantren merupakan institusi pendidikan asli Indonesia yang dalam perjalanannya dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dan zaman. Peran utamanya sebagai lembaga *tafaqqub fiddin* yang menjaga dan menebar Islam *rahmatan lil'alamiin*. Menghadapi modernisasi, pesantren mengakomodir sistem pendidikan sekolah sebagai bagian di dalamnya. Masuknya sistem sekolah ke dalam pesantren, pada satu sisi, dan masuknya sistem pesantren ke dalam sekolah (dikenal dengan istilah *boarding school*) melahirkan spektrum baru pendidikan di Indonesia. Pesantren dengan sistem pendidikan yang mengutamakan ketuntasan belajar berhadapan dengan sistem sekolah dengan karakteristik formal dan klasikal. Perpaduan atau integrasi pesantren dan sekolah ini pada gilirannya melahirkan perubahan sekaligus kesinambungan, baik pada aspek kelembagaan, manajerial, dan kurikulum, juga pada jaringan alumninya. Perubahan pada aspek apa sajakah dan kesinambungan pada hal-hal apa sajakah, merupakan salah satu *concern* buku ini. Selamat membaca!



ZENIUS
PUBLISHER

Jl. Gentong Desa Waruroyom Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon, Kodepos 45653
email: zenius955@gmail.com
web: zeniuspublisher.com

ISBN 978-623-5264-05-9

